

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

RENCANA STRATEGI

Tahun 2015 s/d 2019



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STRATEGI RENSTRA	9
BAB III KERANGKA PENDANAAN	22
LAMPIRAN A USULAN PERUBAHAN NOMENKLATUR RENSTRA ESELON II	24
TABEL LAMPIRAN A : SASARAN DAN INDIKATOR UNIT KEGIATAN	25
LAMPIRAN B : TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KEGIATAN	33
LAMPIRAN C : SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	35
LAMPIRAN D : TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN ELEMEN KEGIATAN	38
LAMPIRAN E : TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN ELEMEN KEGIATAN	45

KATA PENGANTAR

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi merupakan Unit Eselon II dari Ditjen yang baru saja terbentuk pada awal bulan Juli 2015 untuk memperkuat Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka dasar hukum yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih kuat, dan menjadi tantangan utama Ditjen PHLHK untuk dapat menegakkan hukum tersebut. Untuk dapat menegakkan hukum yang tegas dan konsisten, maka diperlukan perencanaan yang matang agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat fokus dan tepat sasaran.

Rencana Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dirancang dalam kurun waktu 5 tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SetDitjen PHLHK.

Dua alasan pokok mengapa Renstra disusun dan ditetapkan, yaitu karena sesuai dengan kaidah manajemen, terutama pentingnya perencanaan, dan kaidah substansi, yaitu yang diamanatkan oleh kebijakan nasional yang berkenaan dengan pembangunan nasional. Renstra ini disusun dengan mengikuti pedoman mengenai penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), terutama pedoman sebagaimana ditetapkan dalam PERMEN-PPN/KA-Bappenas Nomor 5/2014, dan PERMEN KLHK No P.40/Menlhk-setjen/2015 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK tahun 2015-2019. Renstra merupakan dasar bagi penetapan rencana-rencana tahunan, termasuk untuk perencanaan anggaran tahunan, serta untuk pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporannya (LAKIP). PHLHK akan tetap menjaga komitmennya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara terencana dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Dengan ditetapkannya Renstra ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Sekretariat Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2015

Direktur
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

BAB I PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Penerapan Sanksi Administrasi secara umum dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

PENGADUAN

Kegiatan penanganan pengaduan ini meliputi penanganan pengaduan kasus lingkungan kehutanan, lingkungan dan kehutanan, dan yang berkenaan dengan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin. Pengaduan Lingkungan Hidup yang telah ditangani selama periode tahun 2010 – 2014:

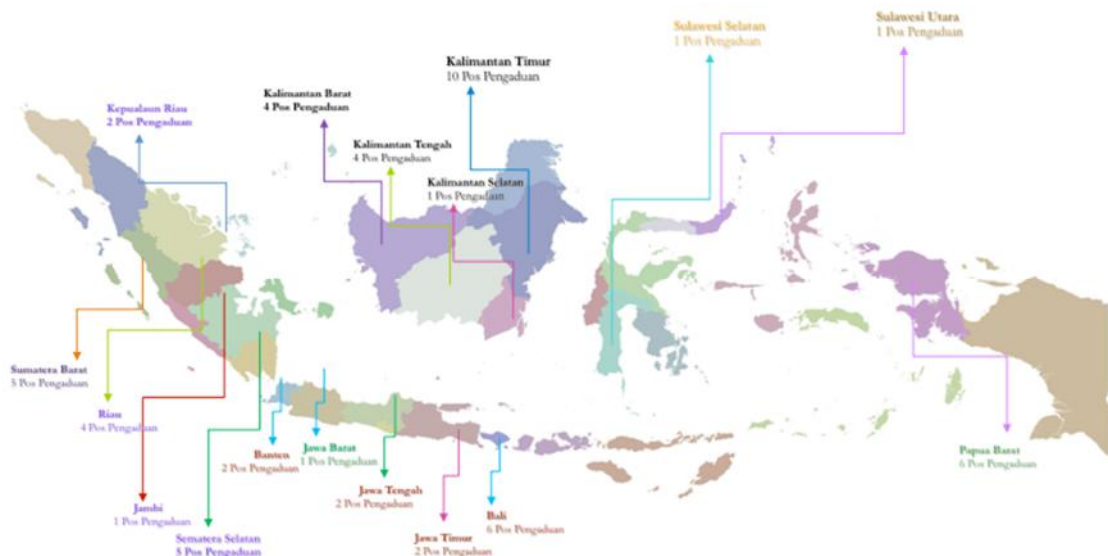


Gambar 1.1. Grafik Penanganan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014

Jenis Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani adalah Pengaduan untuk Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Pencemaran Tanah, Pencemaran akibat B3 dan Kerusakan Lingkungan.

Dari grafik penanganan pengaduan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengaduan kasus Lingkungan Hidup yang masuk dalam tiap tahun tidak dapat diprediksi. Pengaduan Kasus Kehutanan selama periode ini tidak ditangani secara khusus oleh unit Pengaduan tetapi ditangani masing masing unit Eselon I terkait sehingga datanya tidak terdata pada unit Pengaduan. Dalam meningkatkan kinerja penanganan pengaduan kasus lingkungan dan kehutanan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas SDM verifikator pengaduan.

Sampai dengan 2014, terdapat 57 Pos pelayanan pengaduan yang berlokasi di Provinsi dan Pusat sebagai berikut:



Gambar 1.2. Pos Pelayanan Pengaduan di Wilayah Indonesia

PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan penataan atas persyaratan izin ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penurunan daya dukung lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai isu, yaitu isu turunnya kualitas air akibat alih fungsi lahan dan pembuangan limbah, pencemaran udara dan berkurangnya tutupan lahan dan hutan akibat kebakaran hutan. Masih banyak kegiatan/usaha yang masih tidak melakukan pengelolaan lingkungannya. Sehingga penting dilakukan kegiatan pengawasan penataan izin untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penurunan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan Program PROPER yang melakukan pembinaan untuk izin yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha sepanjang tahun 2002-2013, tingkat penataan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dikatakan relatif taat dengan tingkat penataan rata-rata sebesar 70% dari sekitar kurang lebih 2000 perusahaan. Sementara itu jumlah Dokumen AMDAL yang diterbitkan oleh KLH dan Instansi Lingkungan PEMDA sebanyak kurang lebih 8000 dokumen pada tahun 2003 (KLH, 2003). Dari kondisi tersebut masih banyak Perusahaan di luar PROPER yang belum diketahui secara pasti tingkat ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Jenis-jenis dan jumlah izin kegiatan/usaha yang menjadi target untuk diawasi, dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Persyaratan Izin Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2010-2014

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengawasan Pada Penataan Persyaratan Izin	Jumlah
Air	Izin pembuangan air limbah ke laut	119
	Izin penimbunan limbah B3	19
	Izin injeksi air terproduksi	13
	Izin dumping (berlaku hanya 1 tahun)	35
Udara	Izin pengolahan limbah B3 (incinerator)	63
	Izin pemanfaatan limbah B3 (substitusi bahan bakar)	
Tanah	Izin pengolahan limbah B3 (incinerator)	63
	Izin pengumpulan limbah B3	88
	Total izin	500

SANKSI ADMINISTRASI

Pendayagunaan hukum administrasi ditujukan sebagai sarana yuridis bagi upaya pencegahan dan penghentian pelanggaran, serta pemulihan kondisi lingkungan dan hutan. Dalam kurun waktu tahun 2013 – 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan seluruh instrument sanksi administratif sebagaimana tabel Penerapan Sanksi Administrasi Tahun 2013-2015 berikut:

Tabel 1.2. Tabel Penerapan Sanksi Administrasi Tahun 2013-2015¹

Jenis Sanksi Administrasi	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Teguran tertulis		29	5
Paksaan pemerintah	70	53	12
Pembekuan izin lingkungan			7
Pencabutan izin lingkungan			3
Jumlah	70	82	27

Penerapan sanksi administrasi Tahun 2013 berjumlah 70 masih pada jenis Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi 16 jenis kegiatan, antara lain sektor perhotelan, rumah sakit, pengalengan/pembekuan ikan,

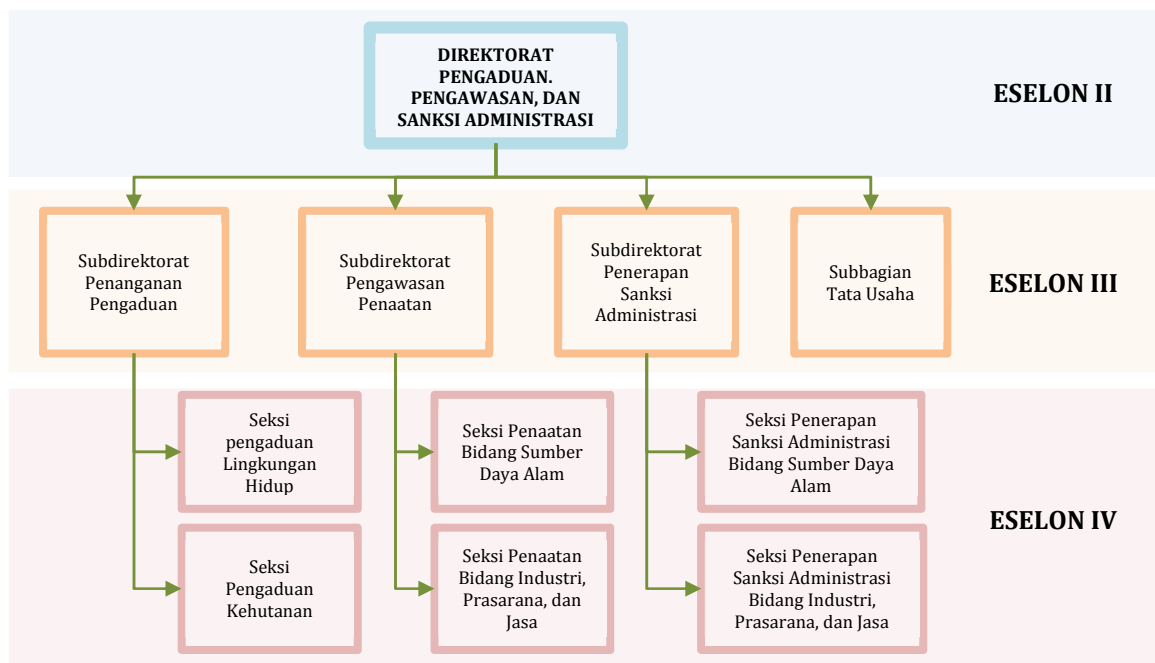
¹ Sumber : (1) Asdep Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan 2013 dan 2014, KLH. (2) Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, KLHK. (3) Data Penerapan Sanksi Administrasi Tahun 2015 sampai dengan Oktober.

dan minyak sawit. Pada Tahun 2014 telah dilakukan penerapan sanksi administrasi sebanyak 82 untuk jenis Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah dan didominasi tujuh jenis usaha dan/atau kegiatan yaitu pelabuhan, rumah sakit, manufaktur, agroindustri, perhotelan, migas serta perkantoran. Pada tahun 2015, sanksi administrasi pertama kali dilakukan untuk kasus kebakaran hutan. Pada saat ini telah dikeluarkan 29 sanksi administrasi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kasus kebakaran hutan pada tahun 2015 di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui penerapan sanksi administrasi, sejauh ini telah memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran. Dalam pendayagunaan instrumen sanksi administrasi terbukti cukup efisien dan efektif, karena tidak memerlukan waktu lama dan dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara secara langsung dalam hal ini oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Penerapan Sanksi Administrasi bekerja dengan struktur organisasi yang disusun dari diagram Gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

Pada pasal 1130 disebutkan bahwa Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan,

bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun pada pasal 1131 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 1130, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi menyeleggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pengenaan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan pengenaan dan evaluasi pengenaan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Jika menelaah dari apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi dalam berkontribusi terhadap tujuan pembangunan dalam rancah lingkungan hidup dengan apa kondisi yang dialami saat ini, memilah strategi seperti apa yang paling jitu untuk dijalani sehingga rencana yang berjalan dapat tepat mengenai sasaran, butuh pengkajian yang sangat kritis. Strategi yang dipilih tentu butuh didasari oleh realita mengenai apa yang dimiliki dan dikuasai sebagai potensi dan permasalahan apa yang sedang menghadang dan/atau akan cepat atau lambat dihadapi.

Saat ini Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi menyorot beberapa permasalahan yang sedang dialami. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera ditangani dan diatasi. Adapaun berbagai permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

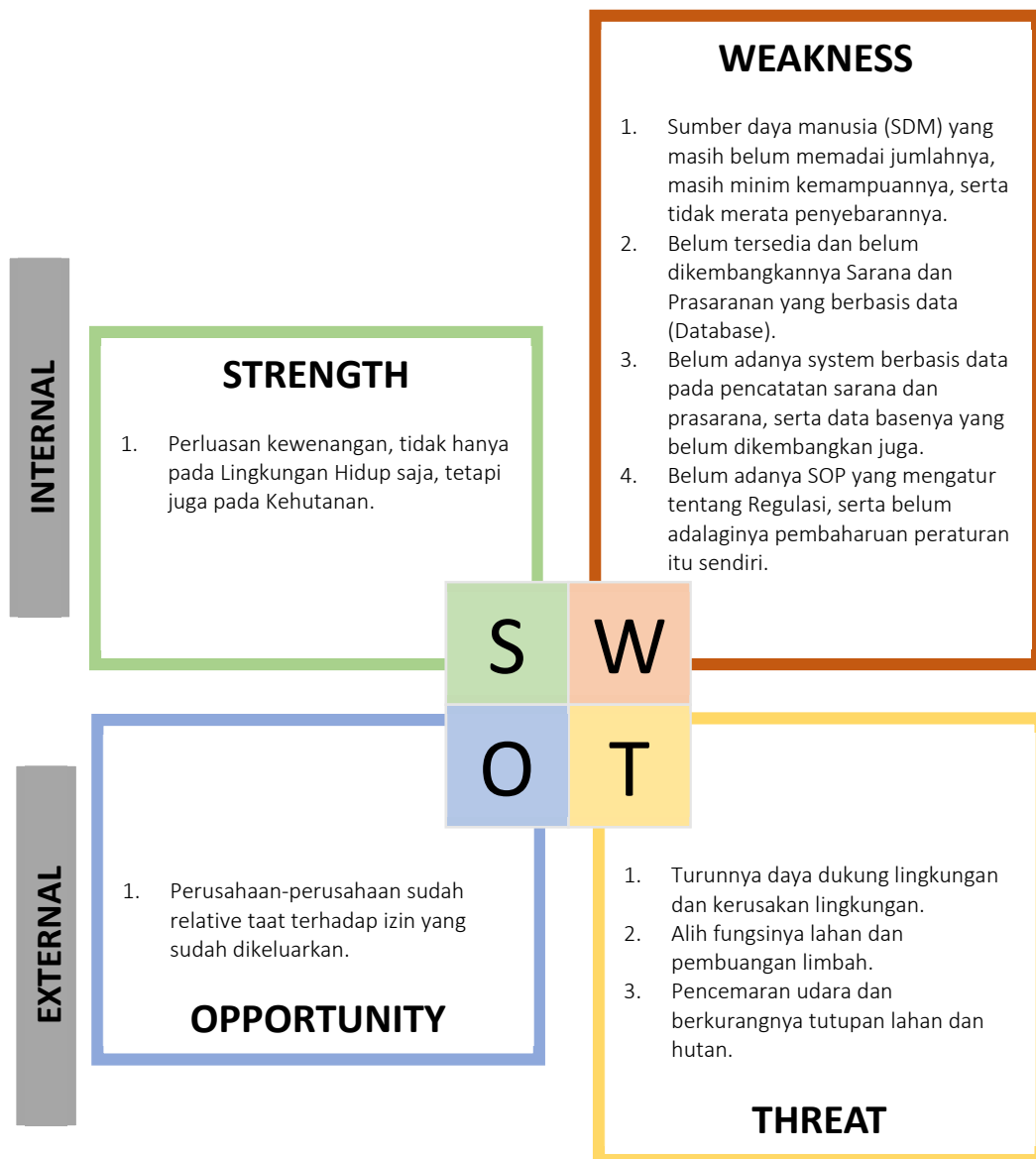
- a. Penanganan Pengaduan

1. Pada penerimaan pengaduan data tidak lengkap (Pengadu tidak jelas, alamat pengadu tidak jelas, identitas, lembaga tidak jelas, substansi tidak jelas), kejadian kasus sudah terlalu lama, dan pengadu tidak mau dikonfirmasi.
 2. Pada penelaahan data tidak lengkap, tenaga penganalisis/penelaah terbatas, dan kompleksnya permasalahan dalam setiap kasus.
 3. Dalam memverifikasi info/data pengaduan lokasi kasus yang diadukan tersebar di seluruh wilayah republik Indonesia dan sebagian berada pada tempat yang terpencil (*remote*), banyaknya pihak yang terkait sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai stakeholders, pembiayaan dan SDM yang terbatas, serta pihak-pihak yang diadukan seringkali tidak kooperatif, sehingga menyulitkan pencarian data di lapangan.
 4. Dalam memproses pengaduan yang terverifikasi kasus yang diadukan terkait dengan kewenangan banyak pihak (kompleks), lokasi yang diadukan sulit dijangkau, dan kendala pengujian sampel yang membutuhkan waktu cukup lama.
 5. Pada tindak lanjut (rekomendasi) tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera karena menjadi kewenangan unit lain dan keterbatasan verifikator di daerah sehingga rekomendasi pengaduan yang dilimpahkan ke daerah tidak langsung ditangani.
 6. Dalam pemantauan pasca layanan Respon dari pihak yang menindaklanjuti pengaduan lambat dan pengadu mempunyai kepentingan pribadi/golongan sehingga melakukan pengaduan berulang sampai kepentingannya tercapai (bukan masalah lingkungan).
- b. Pengawasan Penataan
1. Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPLHD tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan/usaha yang harus dilakukan pengawasan.
 2. PPLH dan PPLHD banyak yang masih tersebar di unit organisasi yang tidak terdapat tugas pengawasan.
 3. Kompetensi PPLH dan PPLHD masih tidak standar karena berasal dari latar belakang pendidikan non eksakta.
 4. PPLH juga melakukan pengawasan terhadap penataan izin kehutanan dan pengawasan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang belum termasuk dalam lingkup kerja PPLH.
 5. Belum memiliki SOP Pengawasan terkait penegakan hukum.
 6. KepmenLH Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawas Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas dan KepmenLH Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup. Masih

mengacu kepada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan institusi Pembina masih pada struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup.

7. Dalam menentukan target operasi pengawasan aspek lingkungan hidup mengacu kepada izin yang diterbitkan oleh KLHK, namun karena belum tersedia database pengawasan yang mencakup informasi perizinan dan masa berlaku izin, maka menentukan target operasi masih dilakukan secara manual.
 8. Data perizinan bidang kehutanan tersebar di masing-masing unit kerja yang berwenang untuk menerbitkan izin sehingga sulit untuk memperoleh data perizinan kehutanan, seperti izin IUPPHHK dari PHPL, IPPA dari KSDAE, Peredaran TSL-izin tangkap, izin pengumpulan, izin ekspor/impor; IPPKH dll.
 9. Masing masing unit penerbit izin juga melakukan kegiatan pengawasan.
 10. Jumlah PPLH masih kurang dibandingkan dengan jumlah target pengawasan, salah satu penyebabnya adalah sebagian PPLH menjadi jabatan structural.
 11. Kompetensi PPLH belum standar karena beragamnya latar belakang pendidikan.
 12. Jabatan fungsional pengawas (PPLH) masih ada yang ditempatkan di luar unit kerja pengawasan sehingga tidak dapat mendapatkan angka kredit jabfung PPLH.
 13. Belum adanya system basis data terkait pengawasan seperti informasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha/kegiatan, personel PPLH, track record penataan perusahaan, informasi stakeholder.
 14. Sarana pendukung pengawasan belum mencukupi.
 15. Belum dilakukan inventarisasi kebutuhan sarana pendukung pengawasan saat ini maupun yang akan datang.
 16. Belum adanya teknologi pendukung pengawasan yang canggih.
- c. Penerapan Sanksi Administrasi
1. Minimnya peraturan perundangan untuk penerapan sanksi administrasi bidang kehutanan.
 2. Belum optimalnya pemerintah daerah melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam penerapan sanksi administrasi.
 3. Sistem data base dan pelaporan tingkat ketaatan penerapan sanksi administrasi perlu dikembangkan dalam rangka mendukung kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain sesuai dengan permasalahan tersebut, mengacu pada tugas pokok dan fungsi Direktorat ini, dengan melakukan analisis mengenai apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari luar (SWOT Analysis) juga, yang menjadi pertimbangan strategi apa yang dicanangkan dalam penyusunan Renstra.



BAB II

STRATEGI RENSTRA

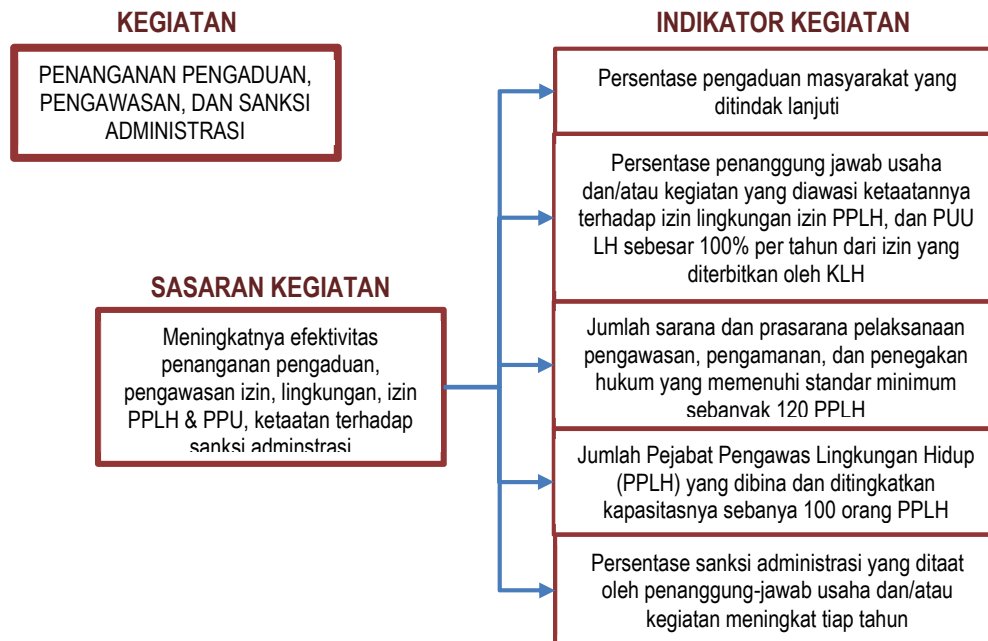
Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Besarnya visi misi pembangunan Indonesia tahun 2015 - 2019 yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi peta seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan yang tepat sasaran dan strategis. Tidak semata-mata pada tingkat kementerian saja, jajaran-jajaran yang bersiaga di bawah tiap kementerian pun turut berbaris dengan deretan rencana matang yang mendukung dan mampu mengelaborasi rencana tersebut menjadi kegiatan yang efektif dan memberi dampak yang nyata.

Jika sebelumnya rencana-rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dijabarkan dalam buku Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun, melalui buku ini Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyusun rencana strategis yang mengalir dari hulu hingga memberi dampak di hilir. Rencana strategis Direktorat telah dikemas menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar rencana-rencana Direktorat ini dapat memberi pengaruh untuk mengenai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana strategis ini dilakukan dengan secara hati-hati dan seksama agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis. Sehingga apa yang dilaksanakan benar-benar akan mampu membawa lingkungan hidup di Indonesia ke arah yang positif. Untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Strategis ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis.

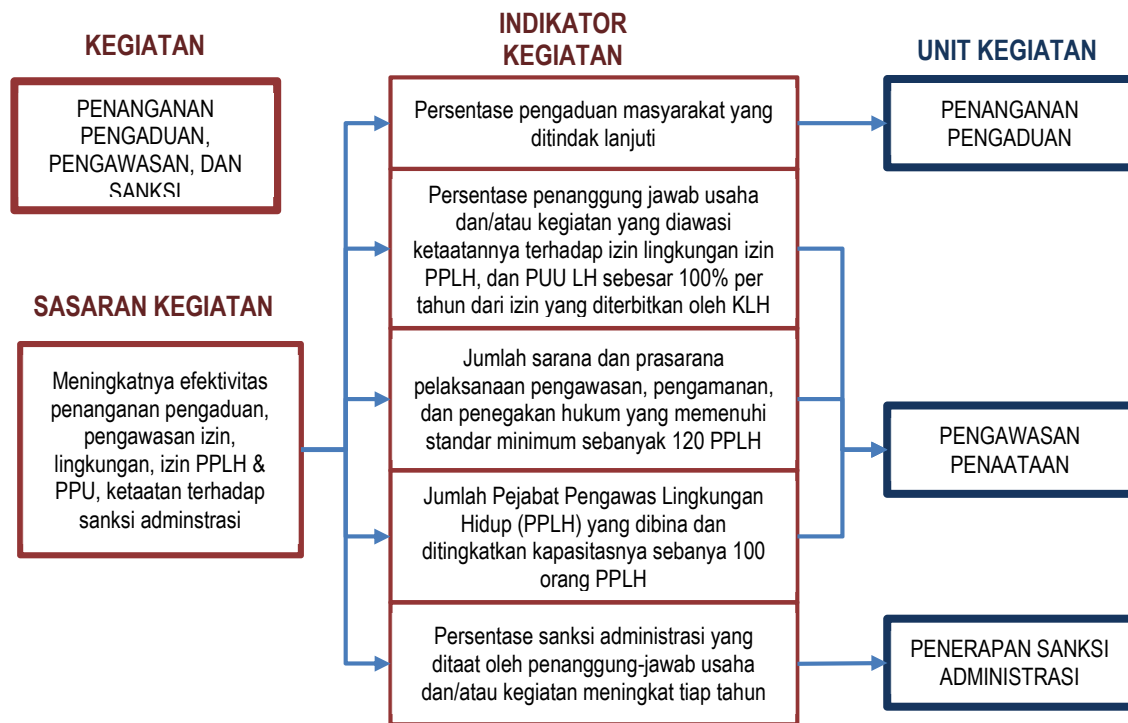
Kegiatan Pengaduan, Pengawasan, Dan Sanksi Administrasi



Gambar 2.4. Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan

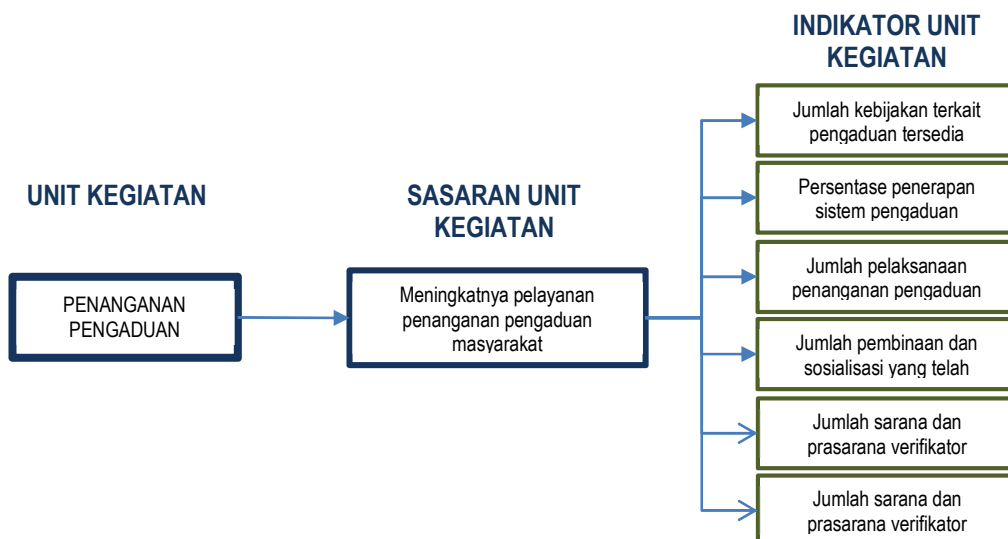
Melanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan.



Gambar 2.5. Relasi Sasaran dan Indikator Kegiatan dengan Unit Kegiatan

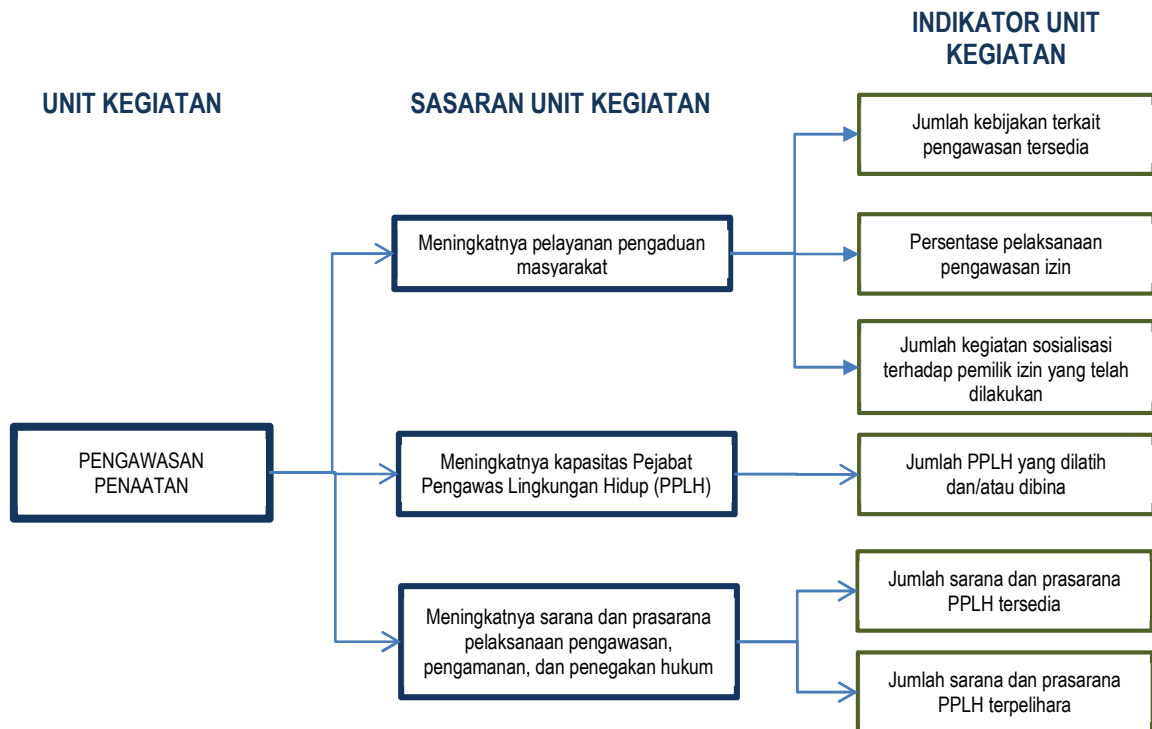
Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi dipastikan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Gambar 2.2. Masing-masing Unit Kegiatan ini kemudian menentukan Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kejadiannya masing-masing. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan dijabarkan pada subbab selanjutnya.

Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan



Gambar 2.6. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan

Unit Kegiatan Pengawasan Penataan



Gambar 2.7. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Pengawasan Penataan

Unit Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi



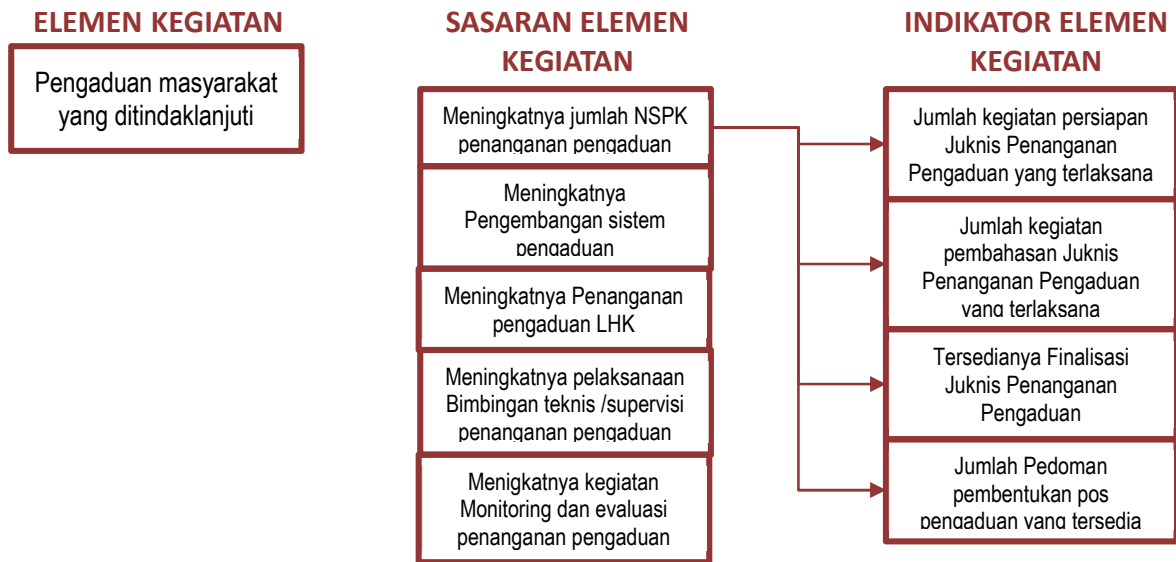
Gambar 2.8. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi

Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan

Seperti halnya Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan yang disusun berdasarkan alur Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan pada renstra juga mengikuti arah Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan. Meskipun demikian, ketika Unit Kegiatan memiliki peran pada Indikator Kinerja Unit Kegiatan tertentu, Elemen Kegiatan mendukung seluruh indikator secara keseluruhan.

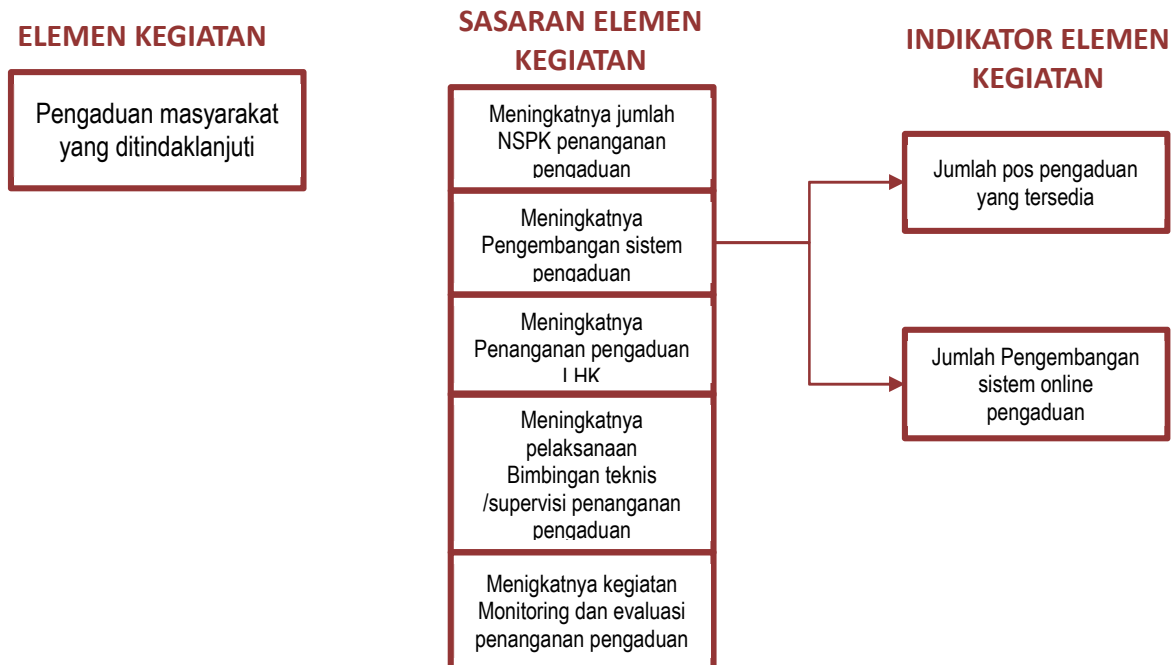
Dalam penyusunannya, telah diupayakan dan telah dipastikan bahwa setiap Indikator Kinerja Elemen Kegiatan dapat mendukung pencapaian sasaran dari sasaran Elemen Kegiatan itu sendiri hingga sasaran yang dimiliki oleh Kementerian. Untuk Sasaran dan Indikator Kinerja masing-masing Elemen Kegiatan dijabarkan pada subbab-subbab berikutnya.

Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



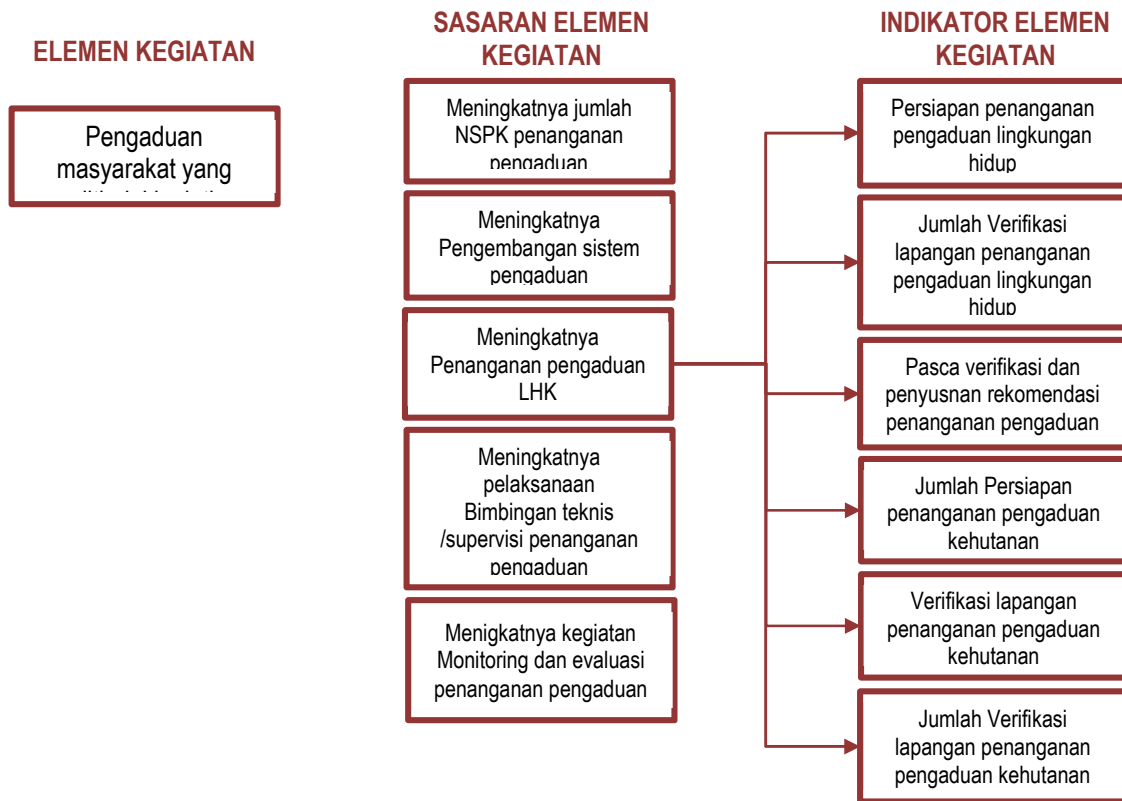
Gambar 2.9. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



Gambar 2.10. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



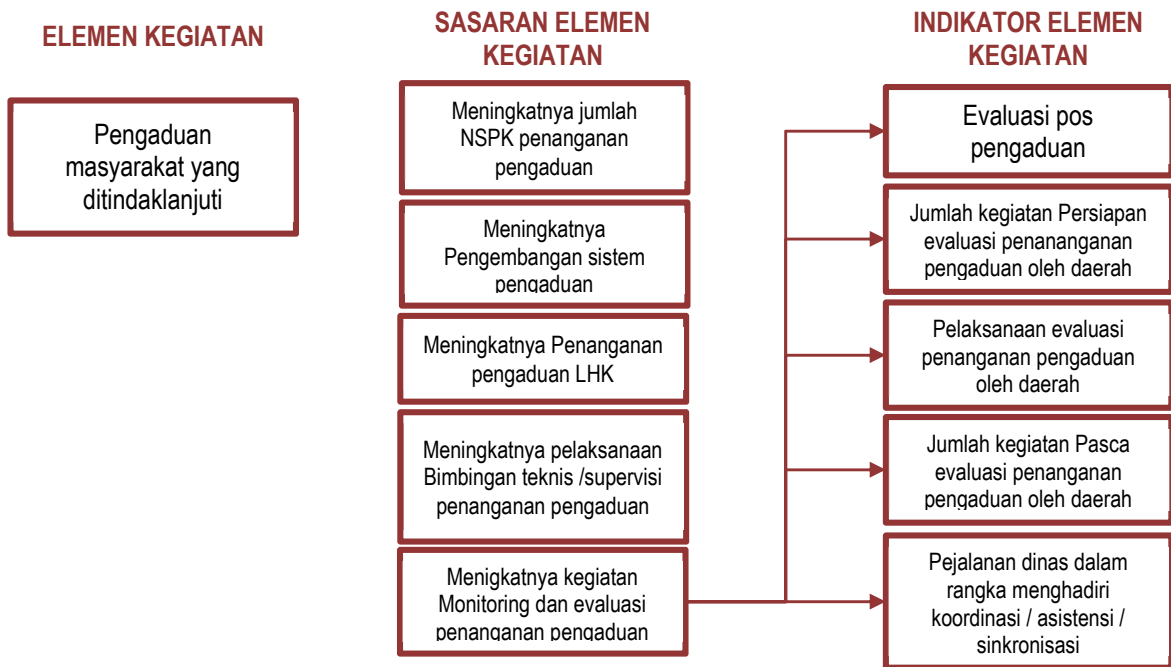
Gambar 2.11. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



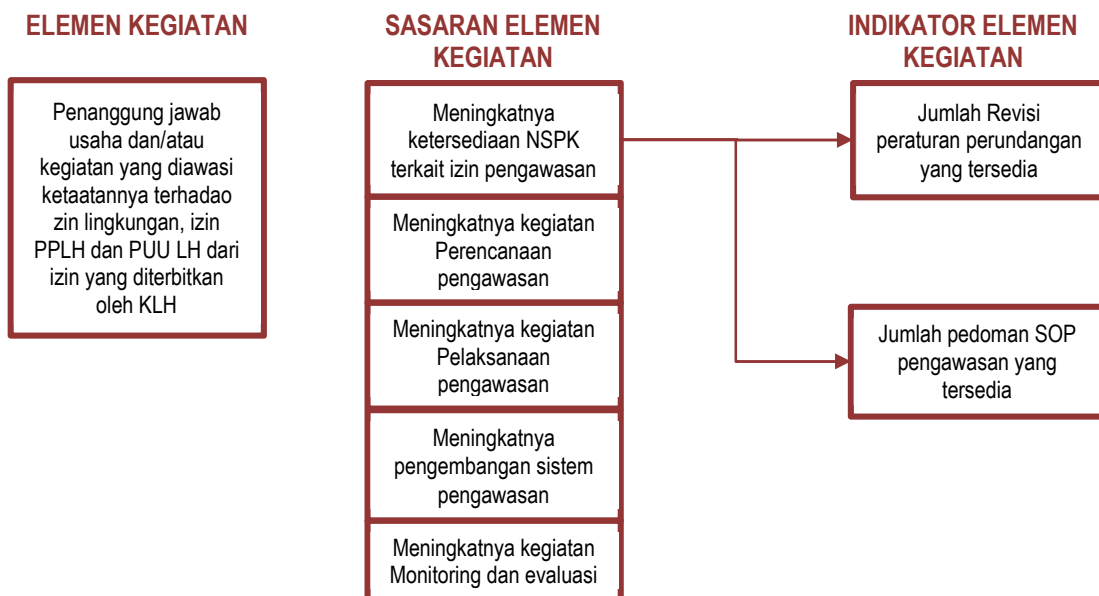
Gambar 2.12. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



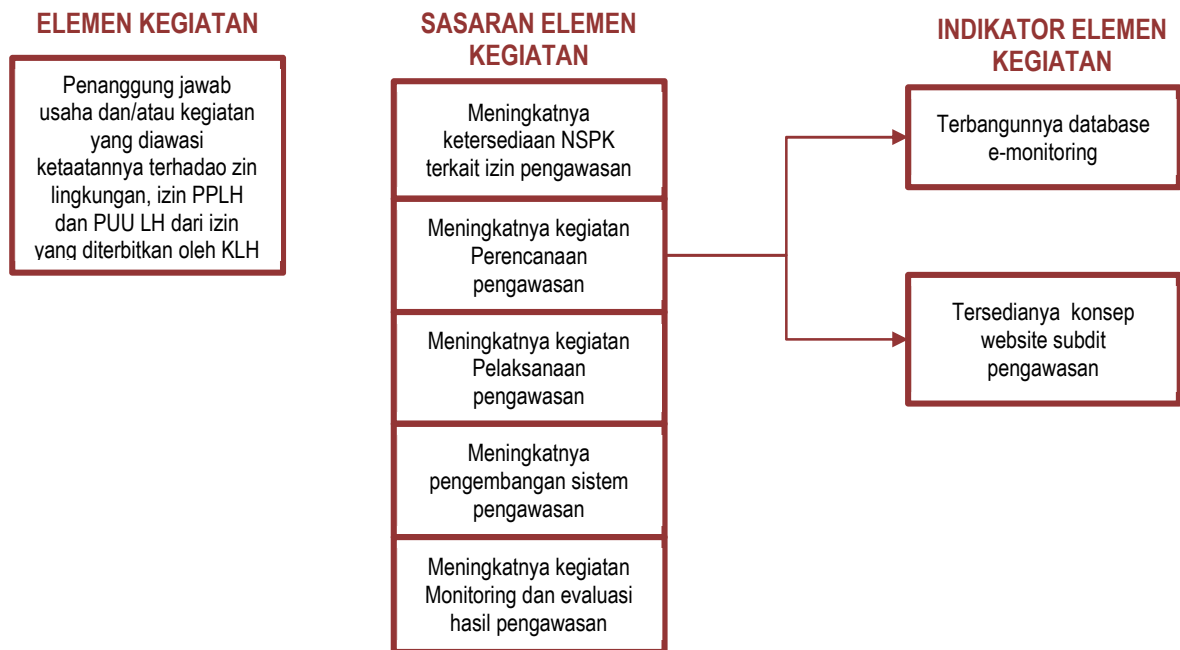
Gambar 2.13. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan Oleh KLH



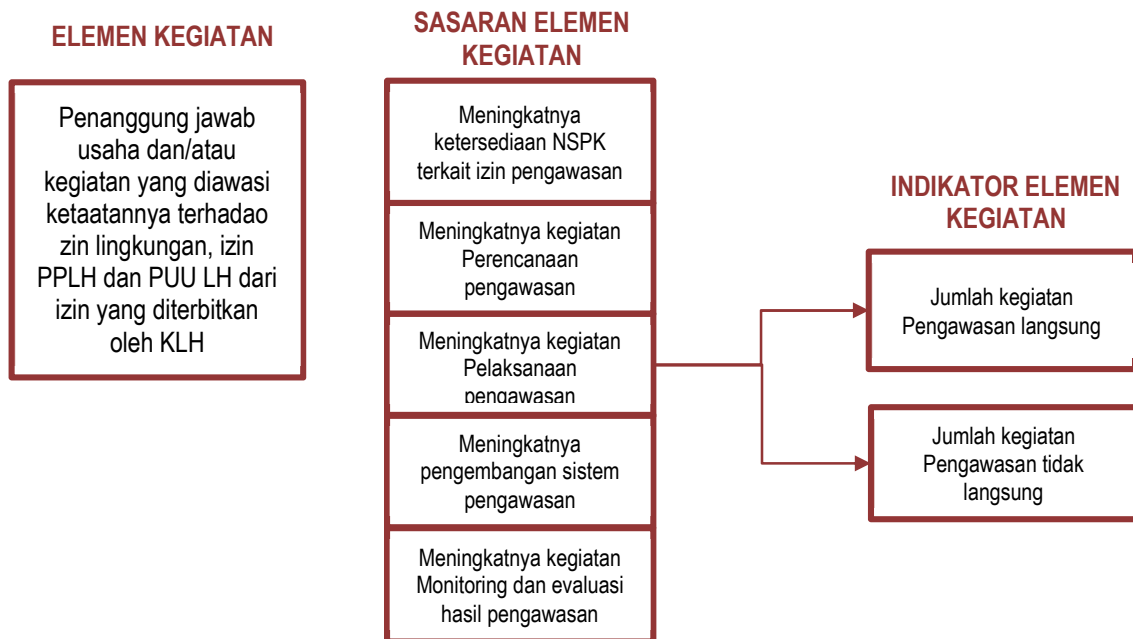
Gambar 2.14. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh KLH

Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan Oleh KLH



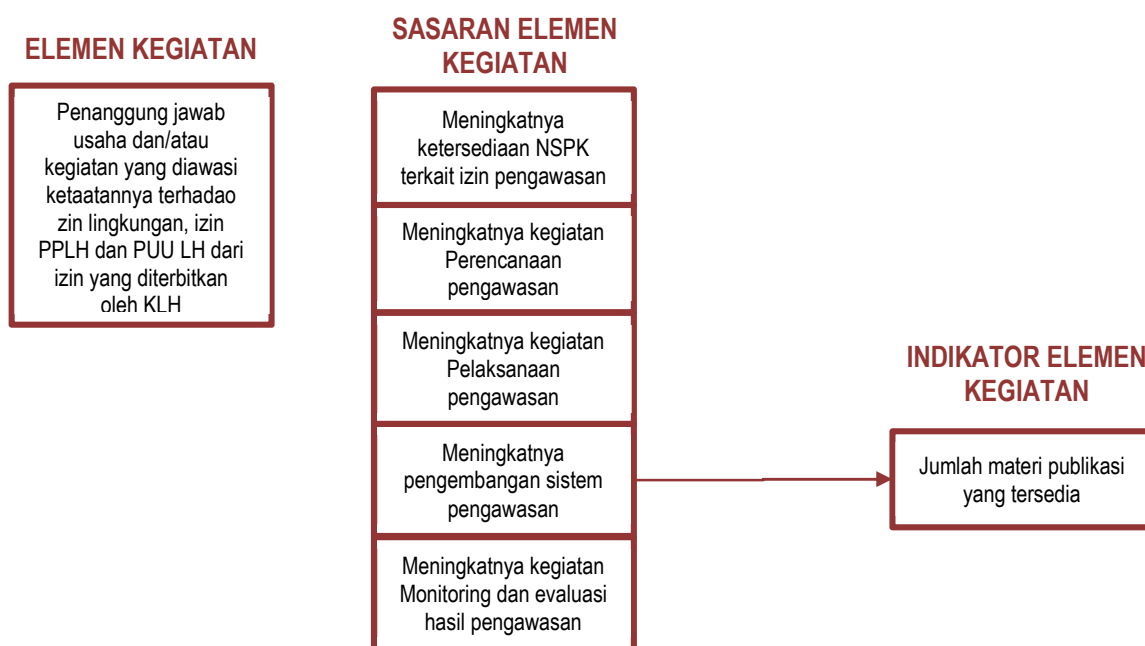
Gambar 2.15. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh KLH

Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan Oleh KLH



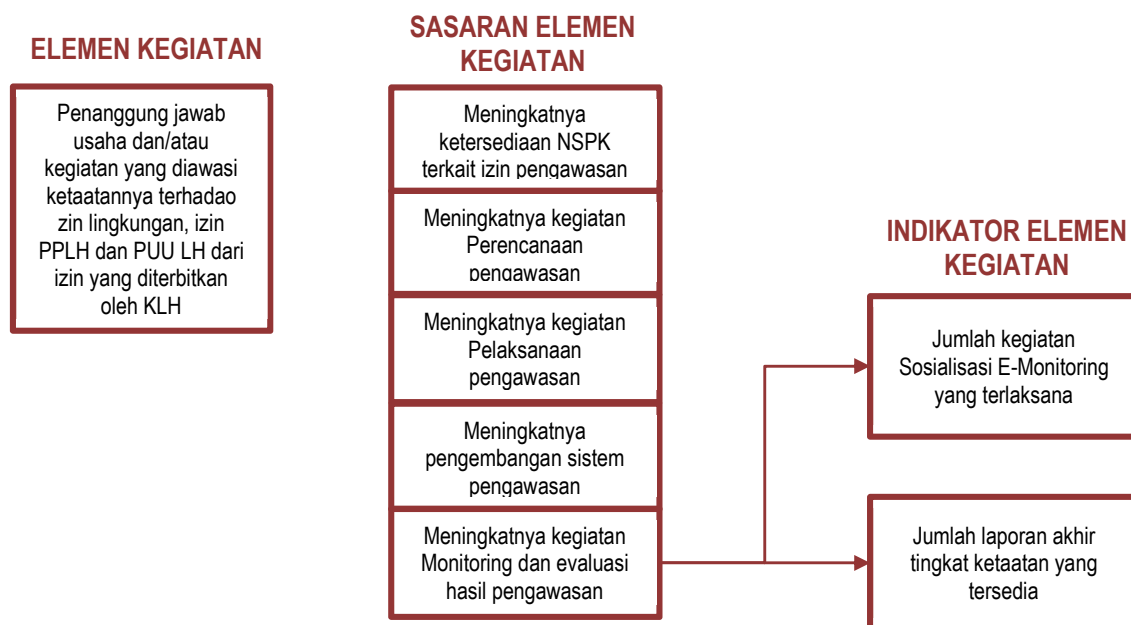
Gambar 2.16. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh KLH

Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan Oleh KLH



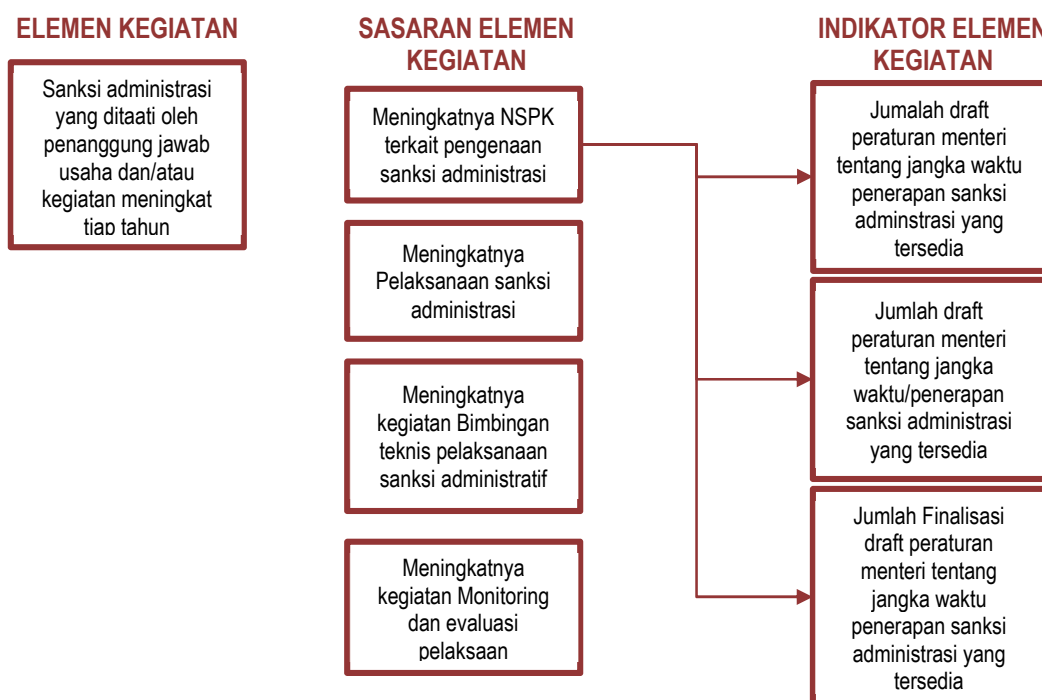
Gambar 2.17. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh KLH

Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan Oleh KLH



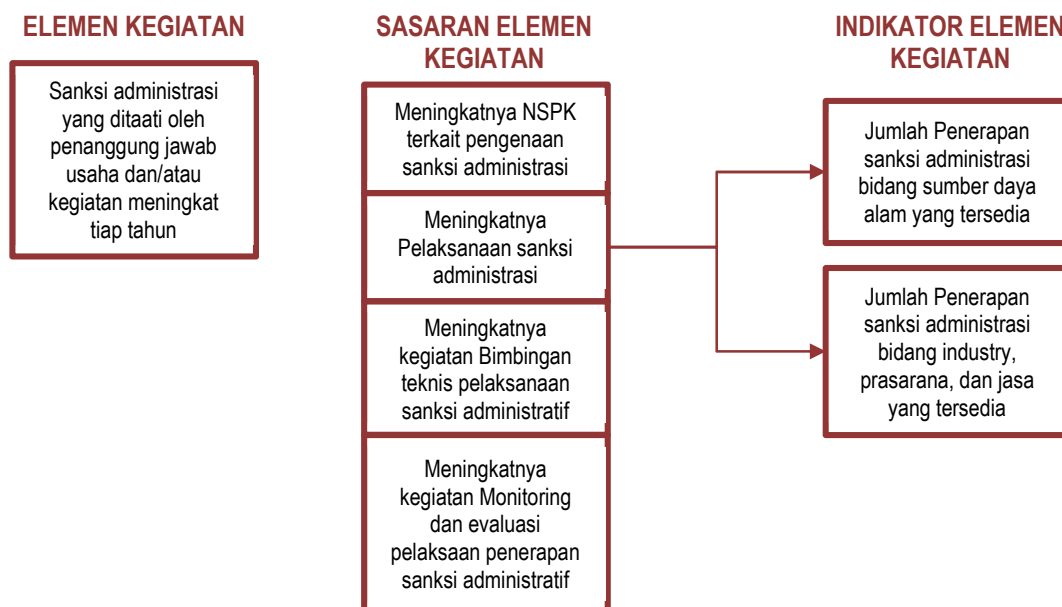
Gambar 2.18. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh KLH

Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang Ditaati Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Meningkatkan Tiap Tahun



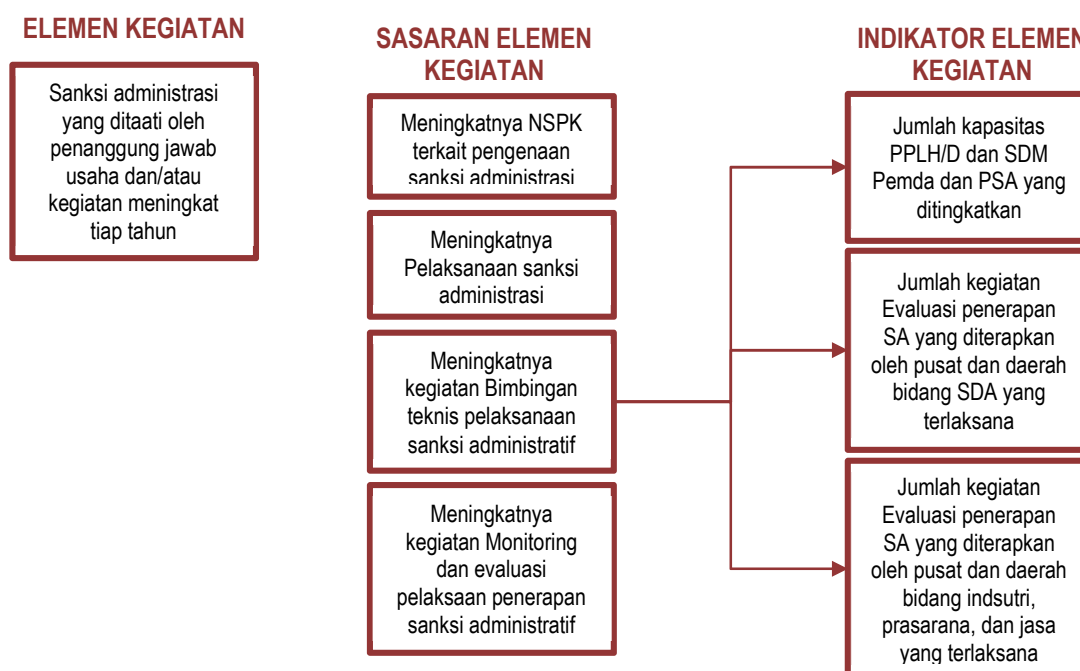
Gambar 2.19. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun

Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang Ditaati Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Meningkatkan Tiap Tahun



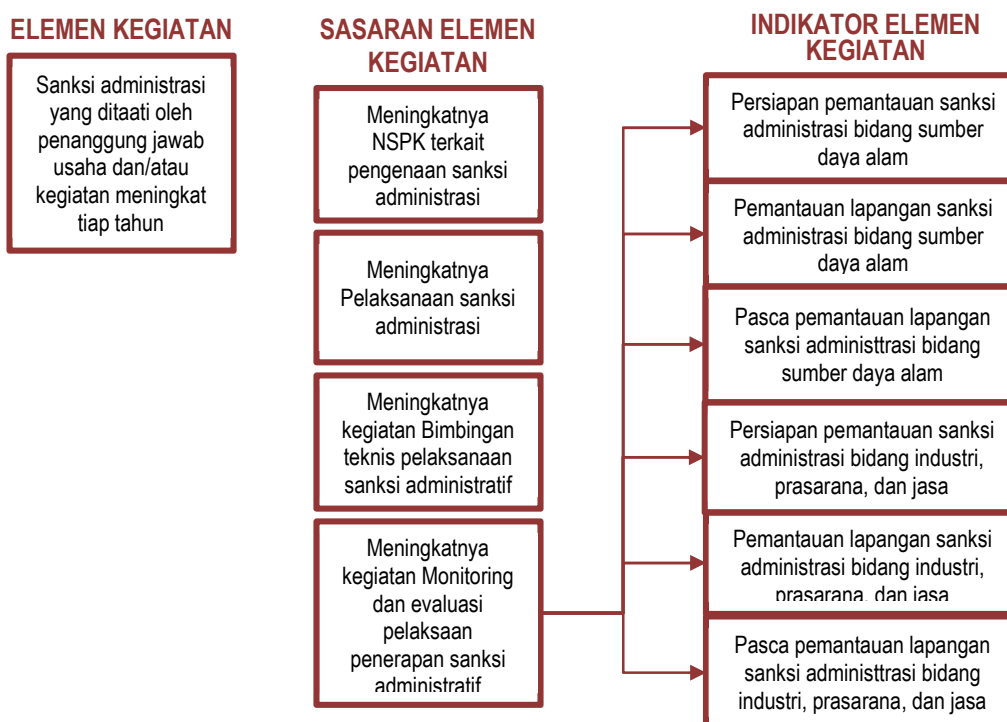
Gambar 2.20. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun

Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang Ditaati Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Meningkatkan Tiap Tahun



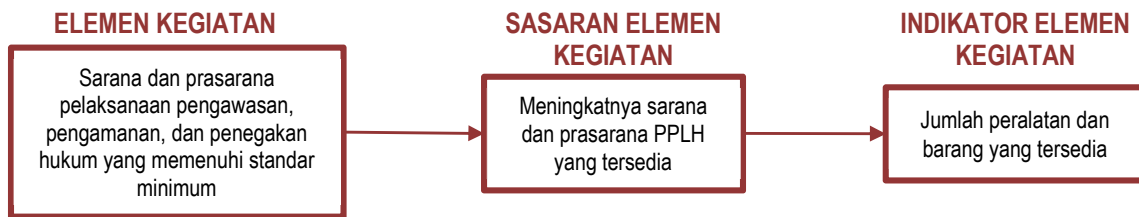
Gambar 2.21. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun

Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang Ditaati Oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Meningkatkan Tiap Tahun



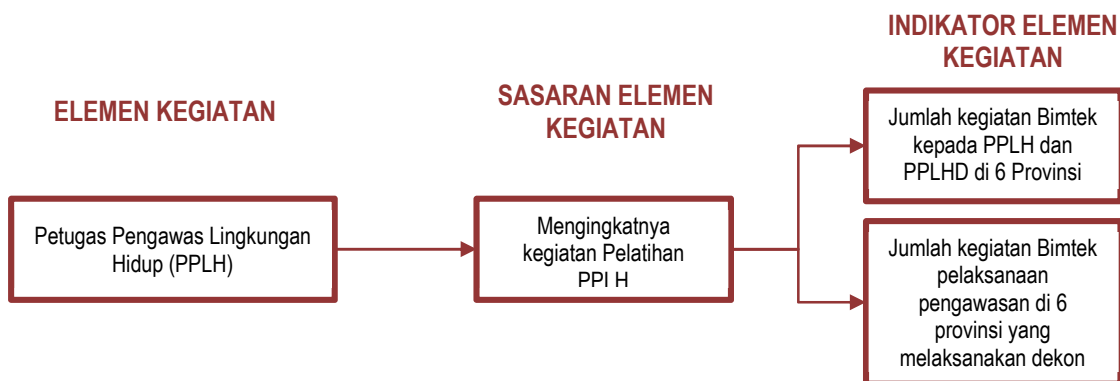
Gambar 2.22. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun

Elemen Kegiatan Sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum



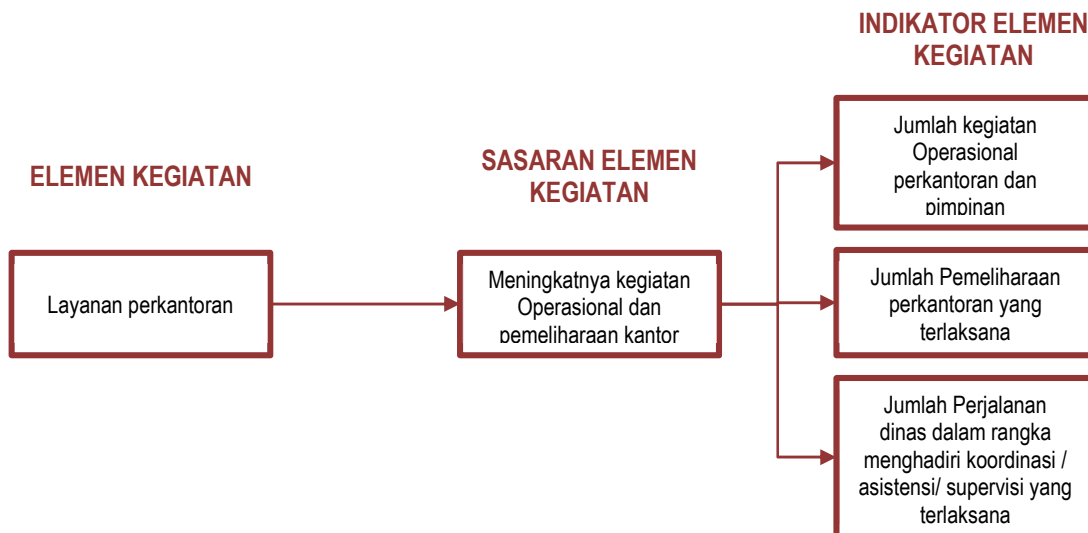
Gambar 2.23. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum yang Memenuhi Standar Minimum

Elemen Kegiatan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)



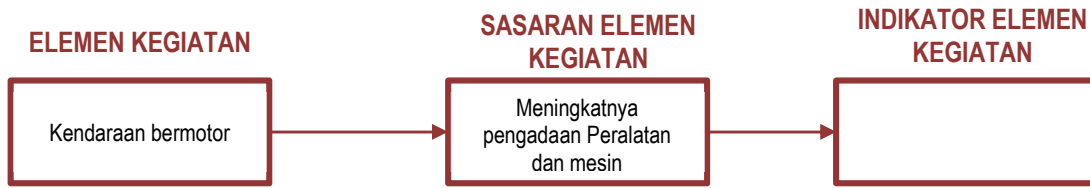
Gambar 2.24. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Elemen Kegiatan Layanan perkantoran



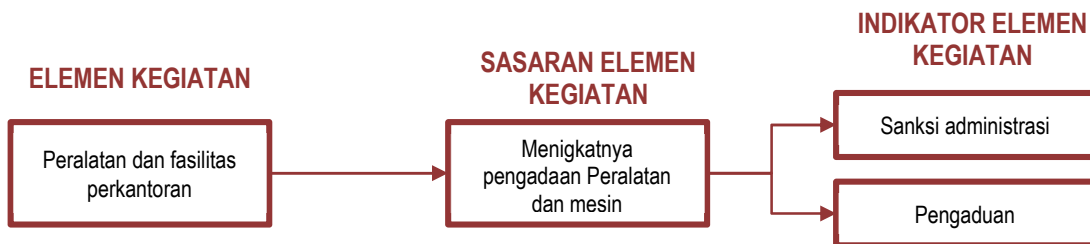
Gambar 2.25. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Layanan Perkantoran

Elemen Kegiatan Kendaraan bermotor



Gambar 2.26. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Kendaraan Bermotor

Elemen Kegiatan Peralatan dan fasilitas perkantoran



Gambar 2.27. Sasaran dan Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

BAB III

KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2015- 2019, diuraikan pada Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

Tabel 3.3. Kerangka Pendanaan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

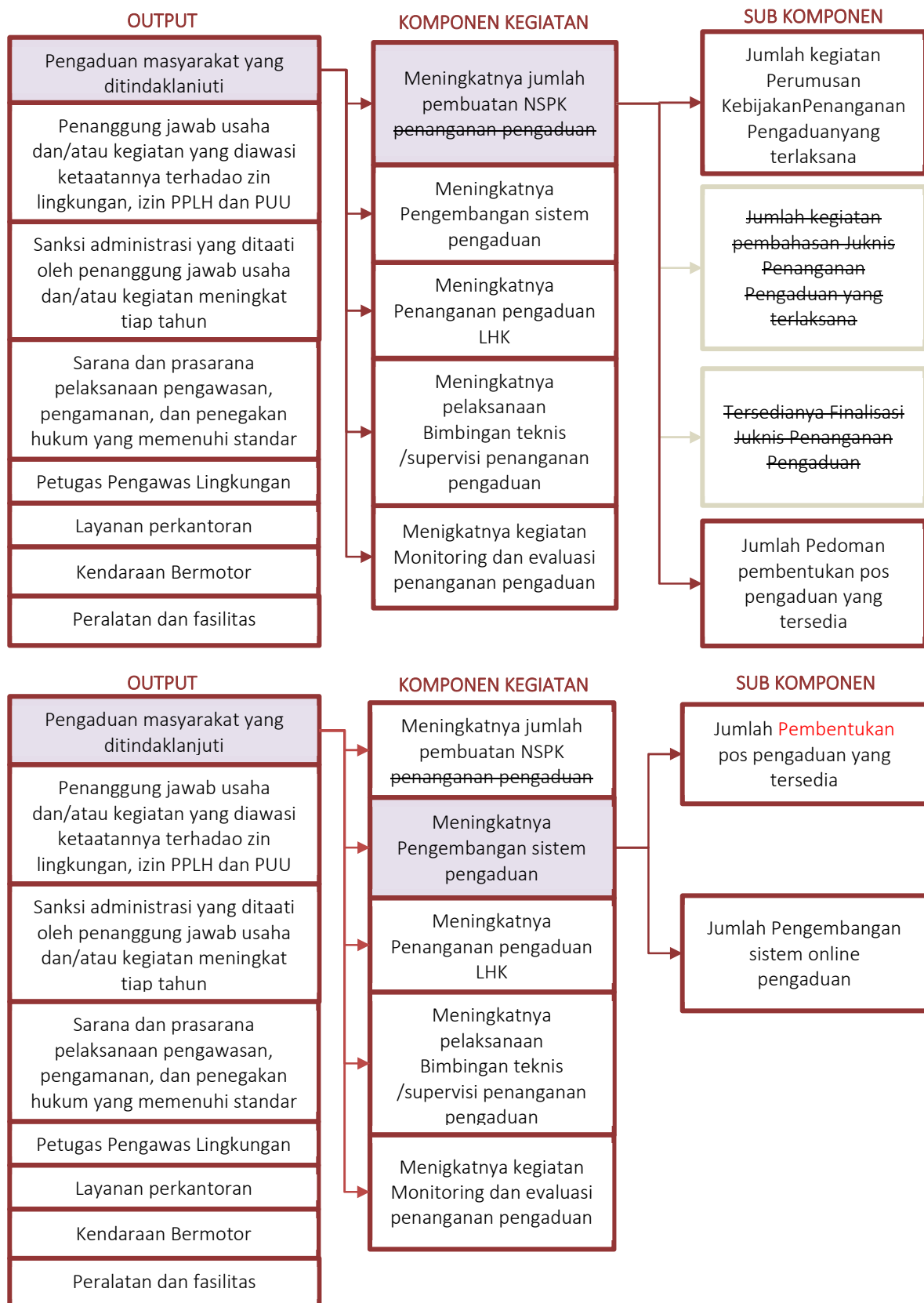
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN		(Rp '000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan						
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		96,530,000	14,904,624	15,742,910	16,629,854	17,568,294
Unit Kegiatan						
	Penanganan Pengaduan	38,612,000	5,888,164	6,228,666	6,588,991	6,970,297
	Pengawasan Penataan	33,785,500	4,904,870	5,166,970	5,444,266	5,737,647
	Penerapan Sanksi Administrasi	28,959,000	4,111,590	4,347,275	4,596,596	4,860,351
Elemen Kegiatan						
	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	35,716,100	5,543,294	5870,346	6,216,697	6,583,483
	Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkan oleh KLH	17,375,400	2,694,665	2,853,648	3,022,013	3,200,312
	Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun	25,097,800	3,766,720	3,988,955	4,224,302	4,473,537
	Sarana dan Prasarana pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum yang memenuhi Standar Minimum	2,413,250	345,545	345,545	345,545	345,545
	Petugas Pengawas Lingkungan hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	10,618,300	1,519,790	1,609,457	1,704,415	1,804,976

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

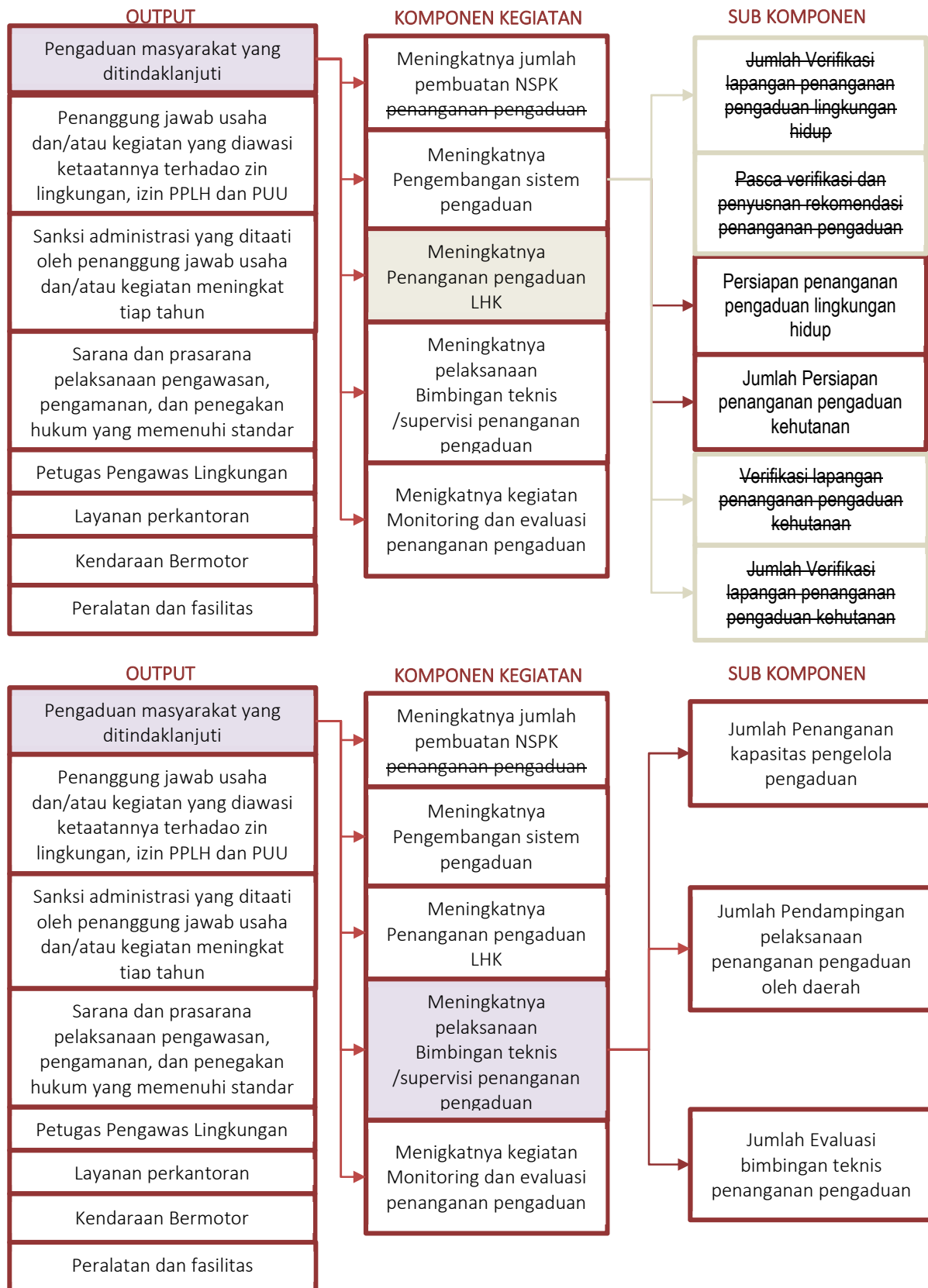
	Layanan Perkantoran	3,861,200	554,210	575,824	698,281	621,614
	Kendaraan Bermotor	965,300	100,000	103,900	107,952	112,162
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2,895,900	380,400	395,235	410,649	426,665

LAMPIRAN A

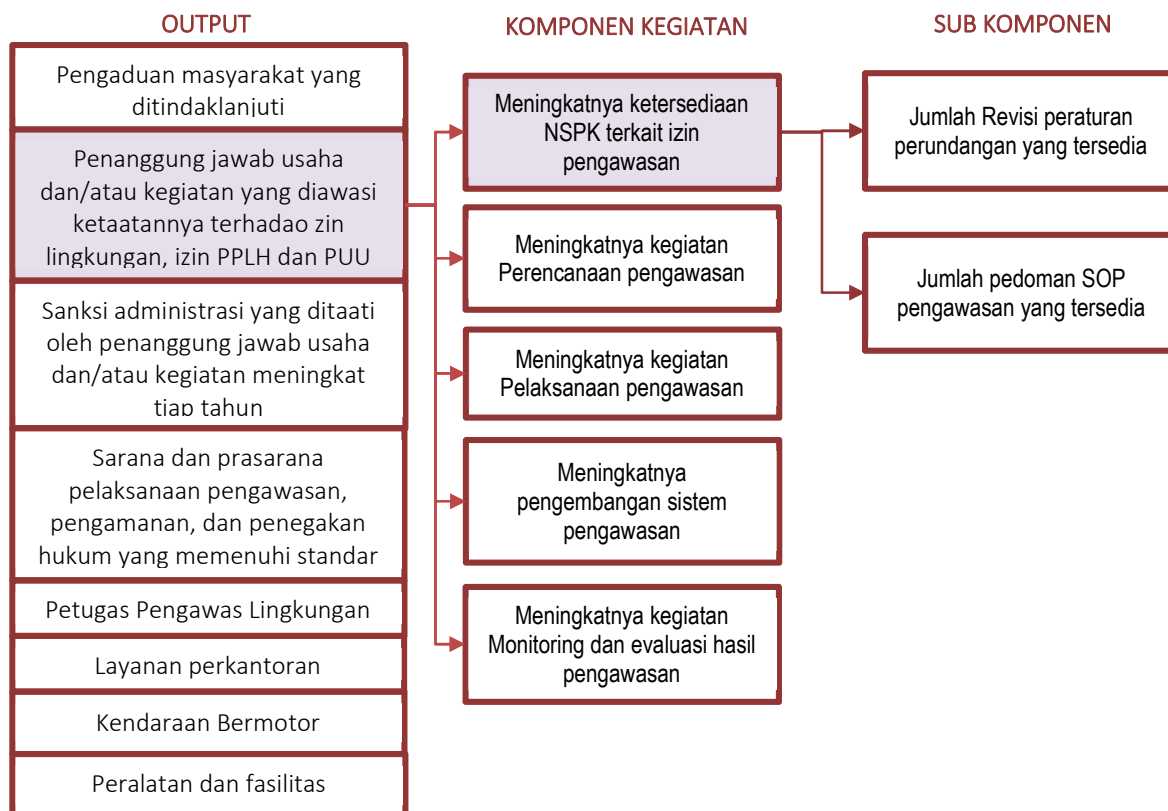
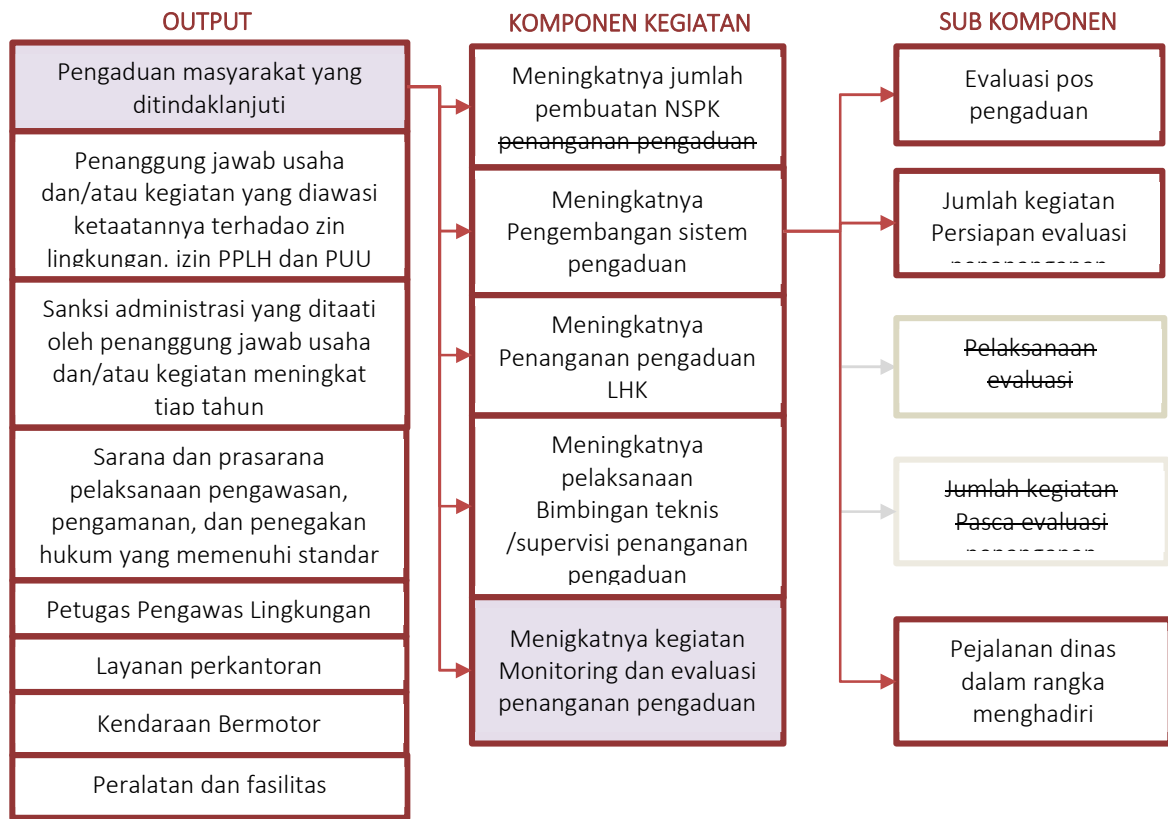
LAMPIRAN A: USULAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN



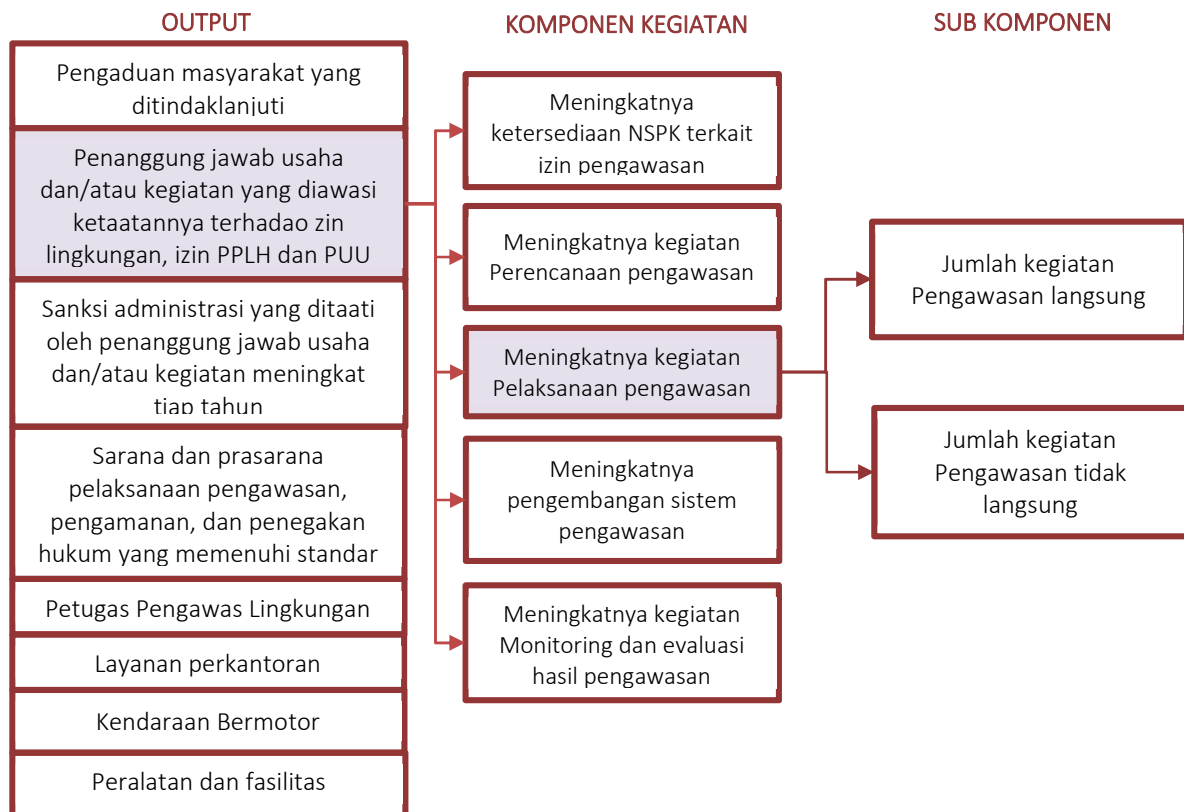
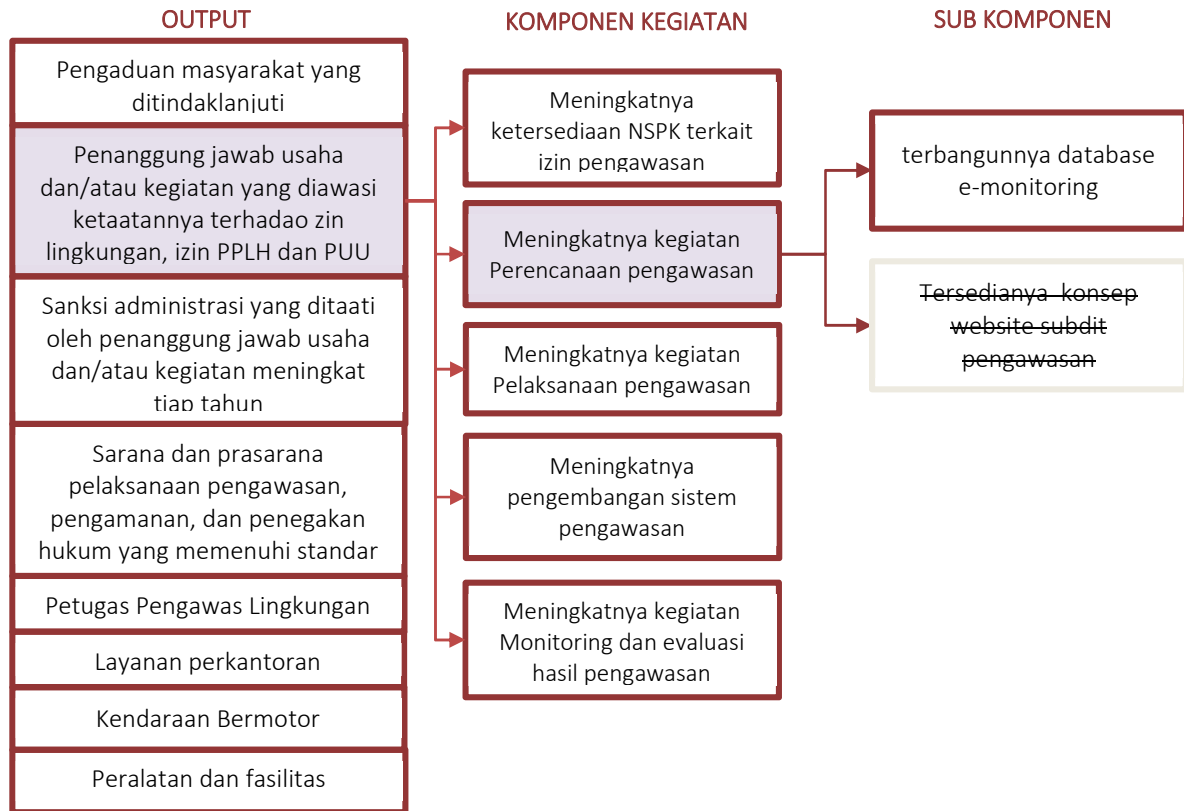
LAMPIRAN A



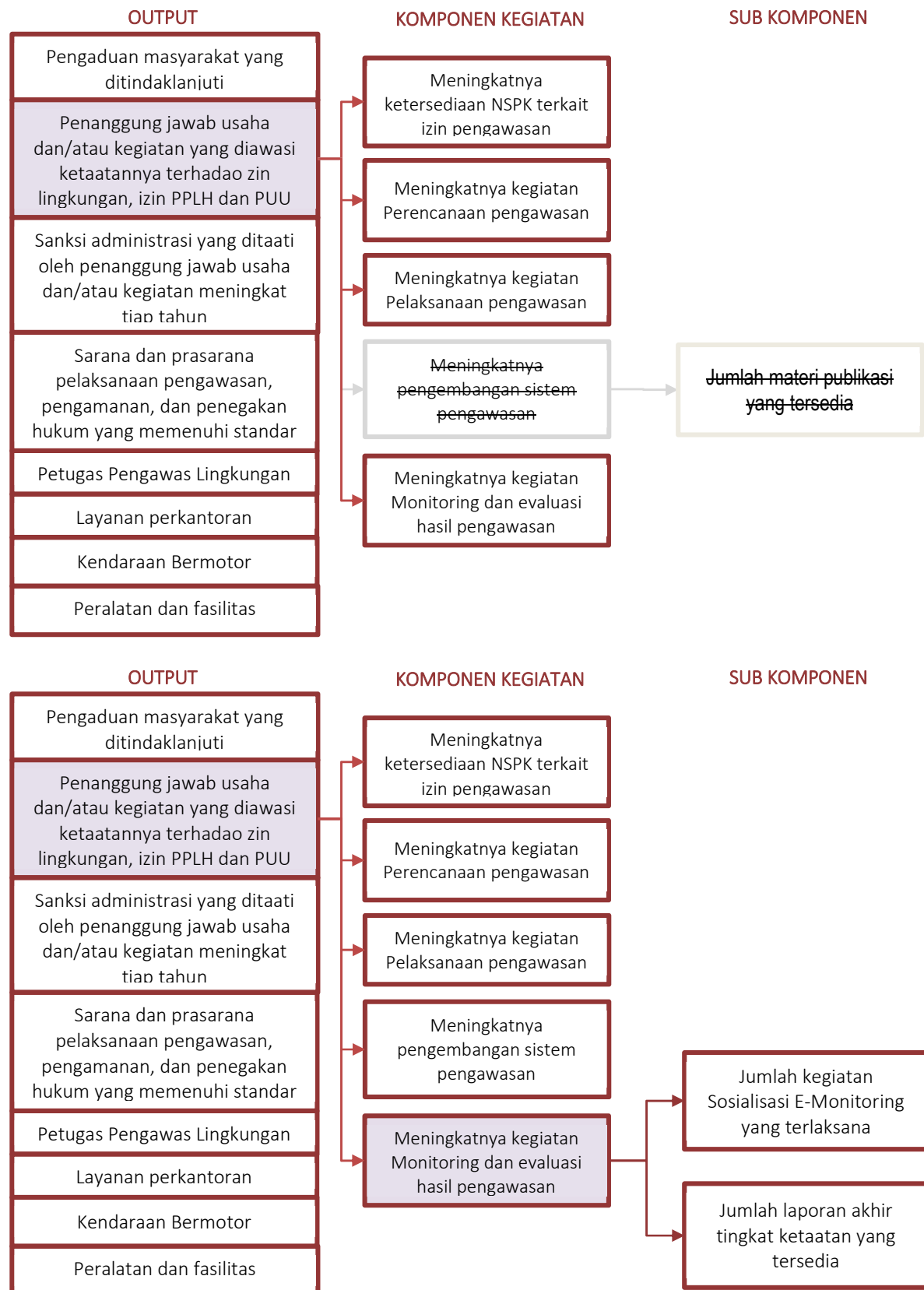
LAMPIRAN A



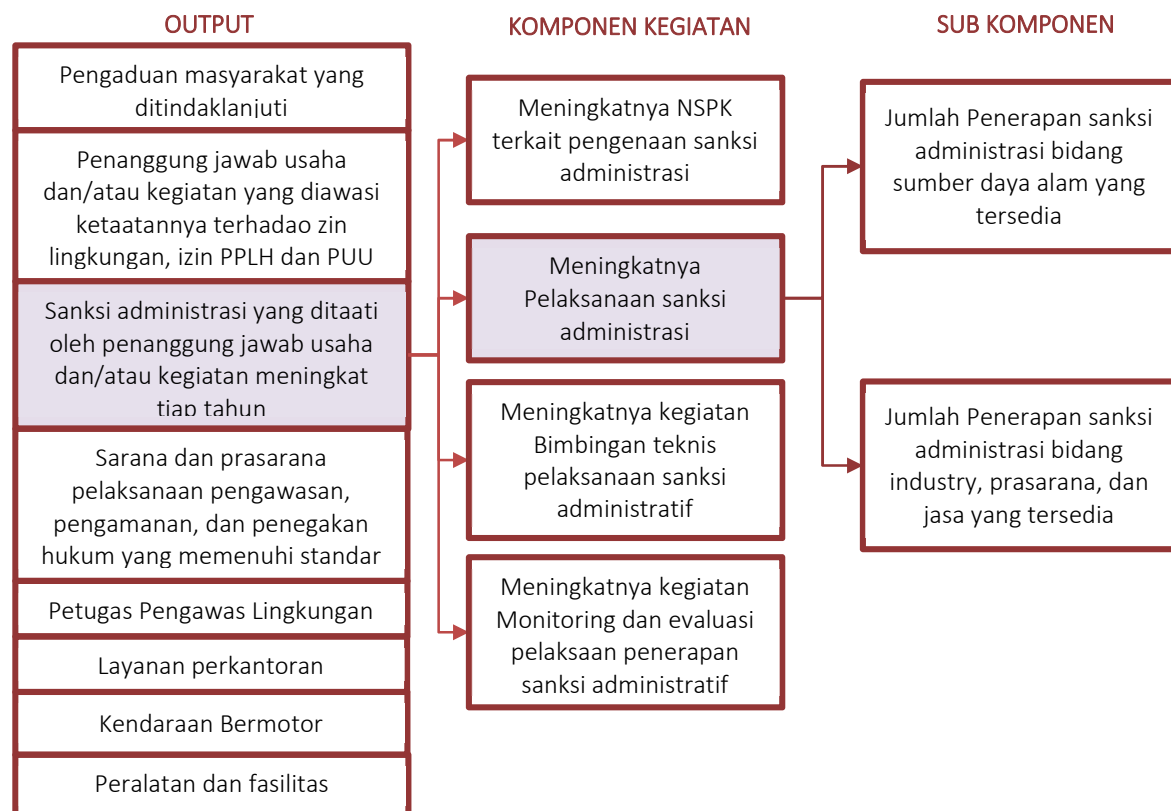
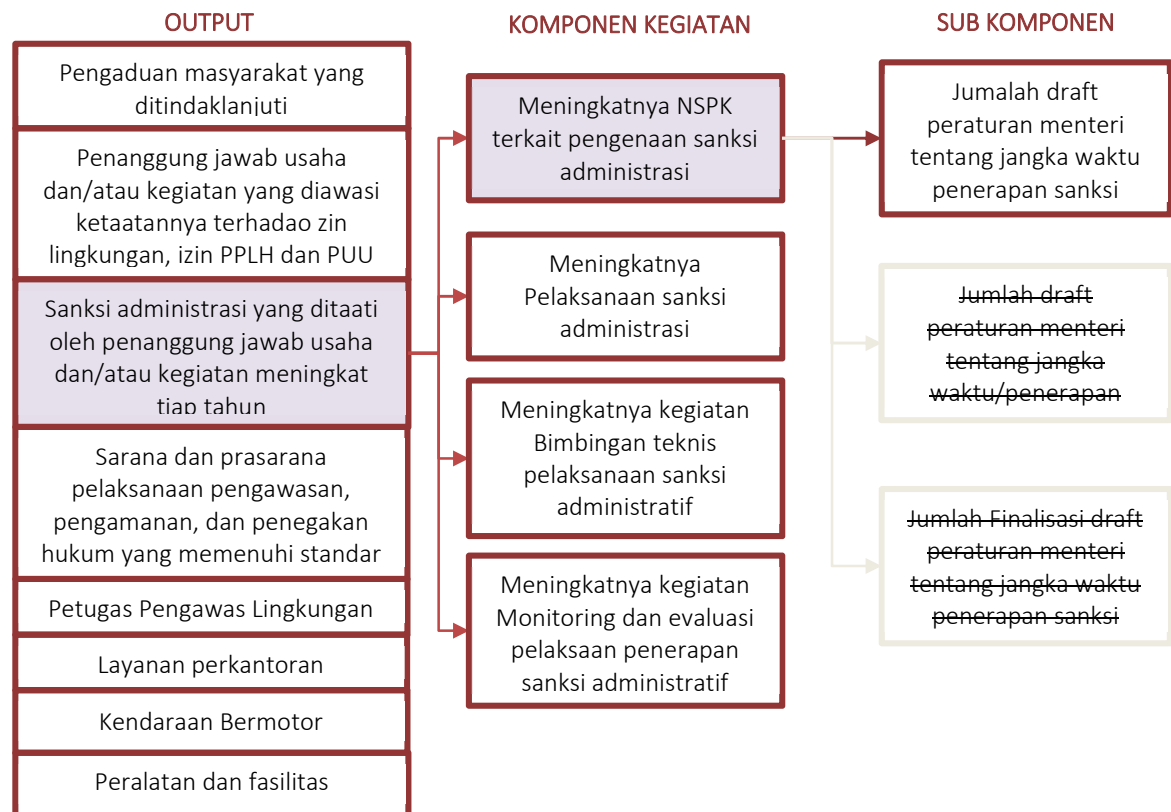
LAMPIRAN A



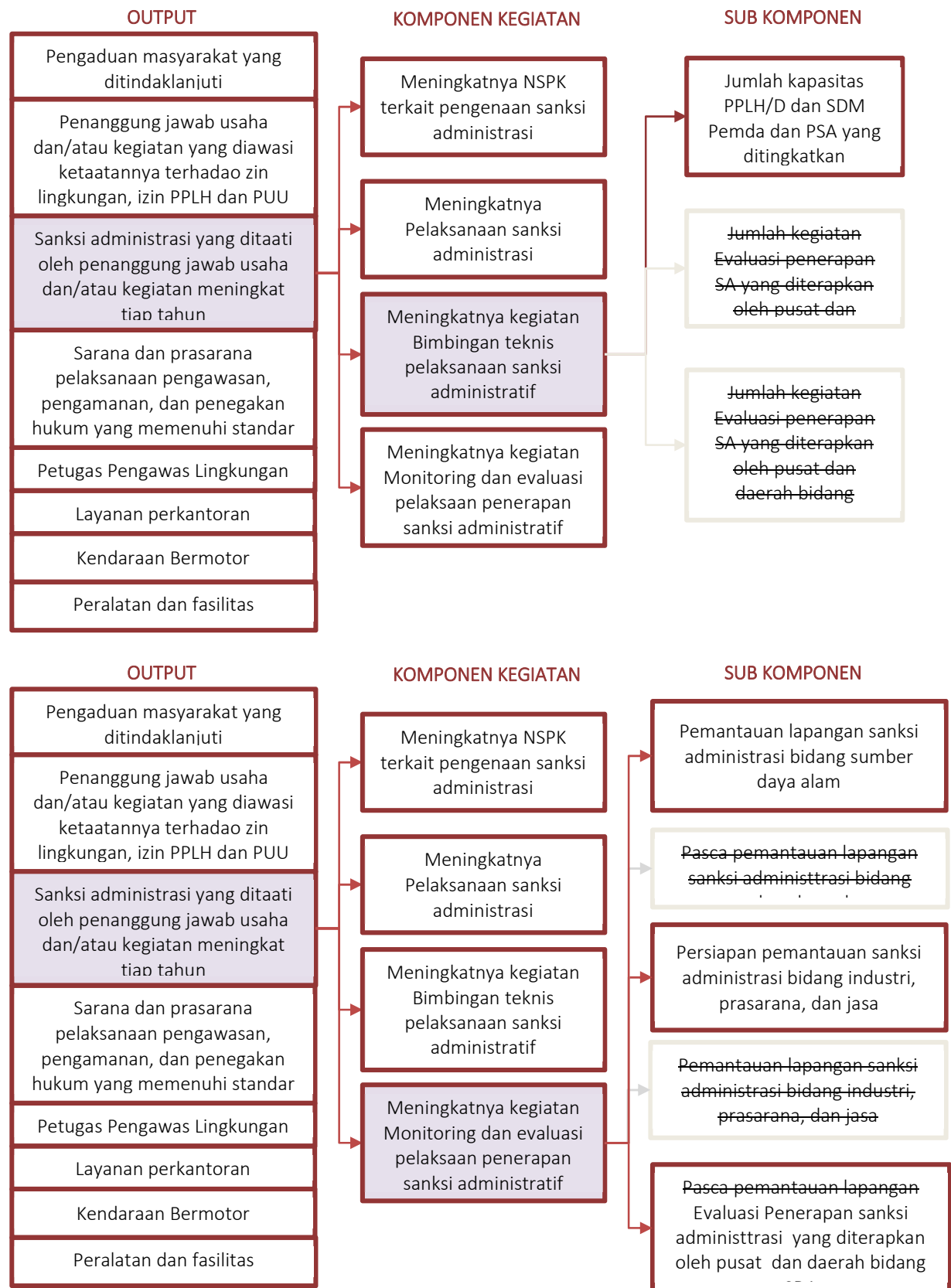
LAMPIRAN A



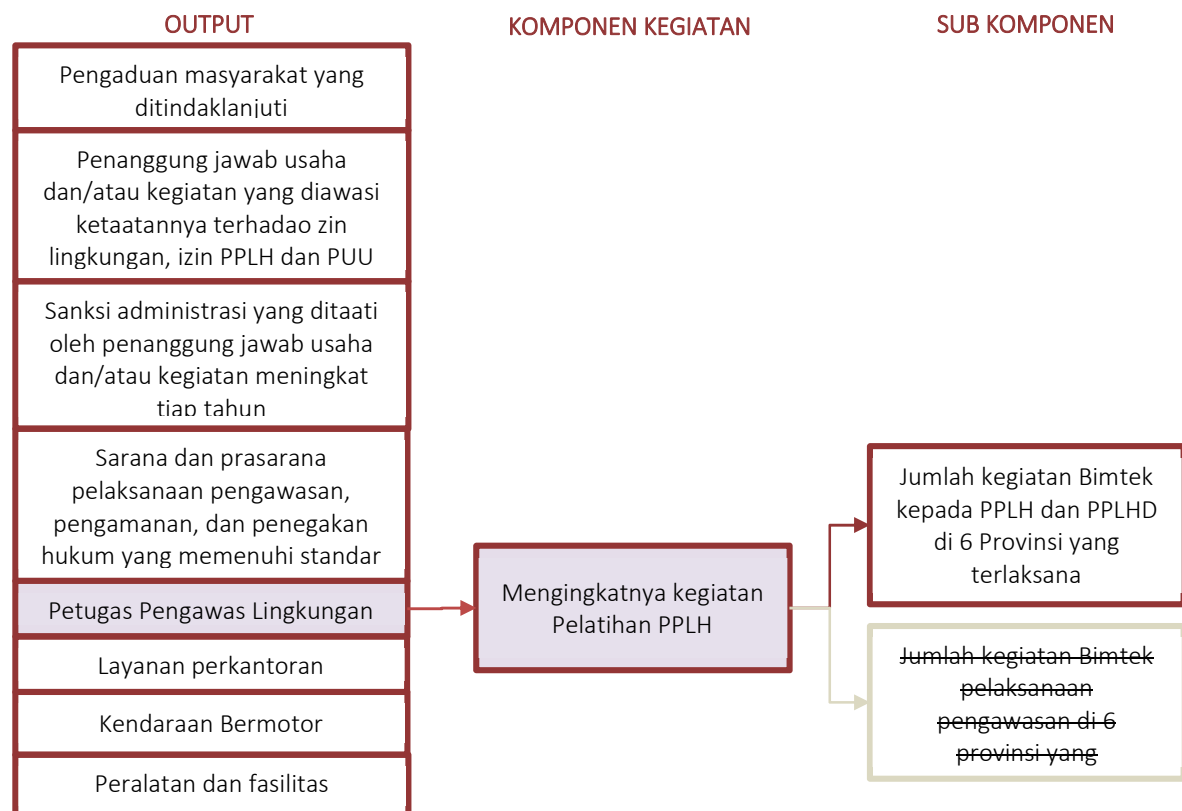
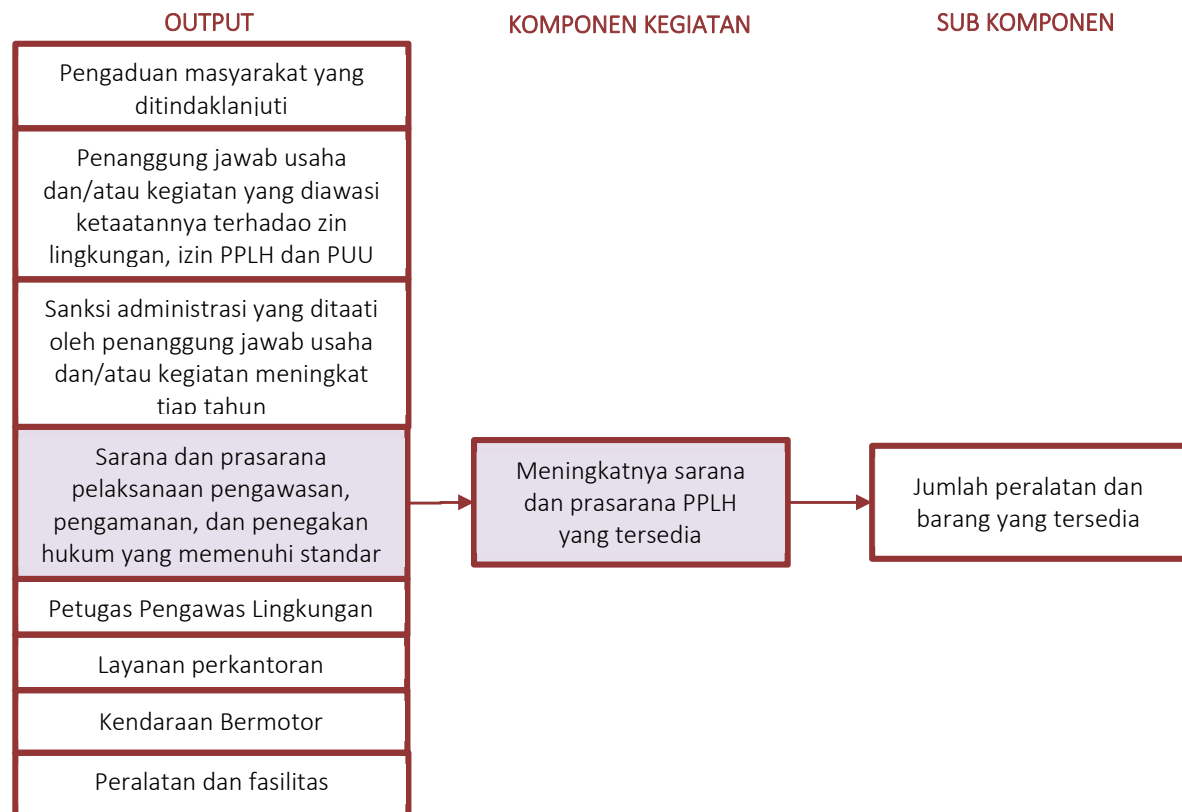
LAMPIRAN A



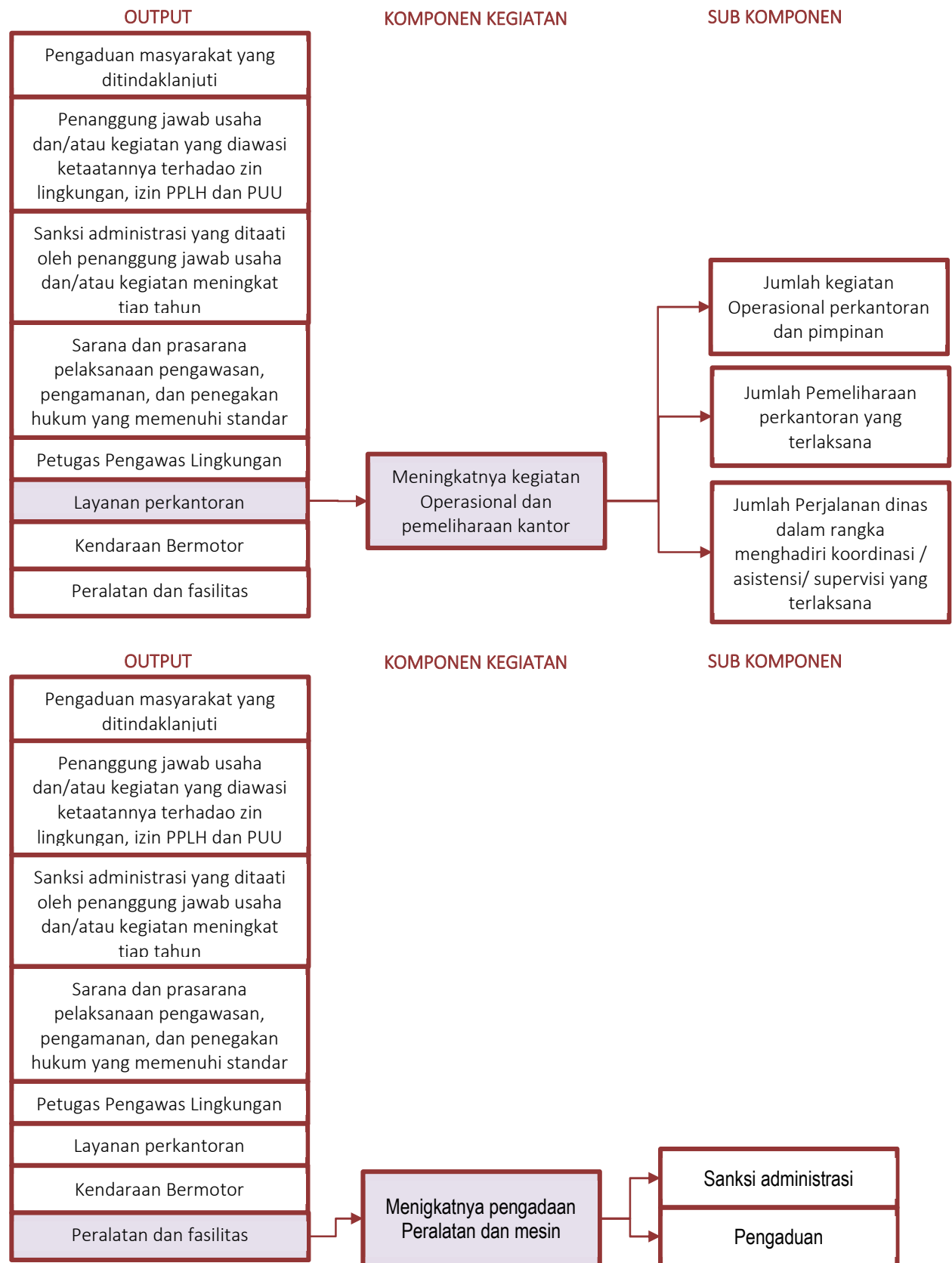
LAMPIRAN A



LAMPIRAN A



LAMPIRAN A



LAMPIRAN B

LAMPIRAN B: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI (K1)		
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, lingkungan, izin PPLH & PPU, ketaatan terhadap sanksi administrasi (S1.P7.K1)	PENANGANAN PENGADUAN (UK1)	
	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat (S1.P7.K1.UK1)	Jumlah kebijakan terkait pengaduan tersedia (S1.P7.K1.UK1.UI1)
		Persentase penerapan sistem pengaduan (S1.P7.K1.UK1.UI2)
		Jumlah pelaksanaan penanganan pengaduan LHK (S1.P7.K1.UK1.UI3)
		Jumlah pembinaan dan sosialisasi yang telah dilakukan (S1.P7.K1.UK1.UI4)
		Jumlah sarana dan prasarana verifikator tersedia (S1.P7.K1.UK1.UI5)
		Jumlah sarana dan prasarana verifikator terpelihara (S1.P7.K1.UK1.UI6)
	PENGAWASAN PENAATAN (UK2)	
	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat (S1.P7.K1.UK2.1)	Jumlah kebijakan terkait pengawasan tersedia (S1.P7.K1.UK2.1.UI1)
		Persentase pelaksanaan pengawasan izin (S1.P7.K1.UK2.1.UI2)
		Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap pemilik izin yang telah dilakukan (S1.P7.K1.UK2.1.UI3)
	Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) (S1.P7.K1.UK2.2)	Jumlah PPLH yang dilatih dan/atau dibina (S1.P7.K1.UK2.2.UI1)

LAMPIRAN B

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S1.P7.K1.UK2.3)	Jumlah sarana dan prasarana PPLH tersedia (S1.P7.K1.UK2.3.UI1)
		Jumlah sarana dan prasarana PPLH terpelihara (S1.P7.K1.UK2.3.UI2)
	PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI (UK3)	
	Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan (S1.P7.K1.UK3)	Jumlah kebijakan terkait Sanksi Administrasi tersedia (S1.P7.K1.UK3.UI1)
		Jumlah penerapan sanksi administrasi (S1.P7.K1.UK3.UI2)
		Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap penanggung jawab usaha (S1.P7.K1.UK3.UI3)

LAMPIRAN C

LAMPIRAN C: TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp '000)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
K1: PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI								96,530,000	14,904,624	15,742,910	16,629,854	17,568,294
<u>S1.P7.K1</u> Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, lingkungan, izin PPLH & PPU, ketaatan terhadap sanksi administrasi	UK1: PENANGANAN PENGADUAN								5,888,164	6,228,666	6,588,991	6,970,297
	<u>S1.P7.K1.UK1</u> Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	<u>S1.P7.K1.UK1.UI1</u> Jumlah kebijakan terkait pengaduan tersedia		4	4	1	1		5,888,164	6,228,666	6,588,991	6,970,297
		<u>S1.P7.K1.UK1.UI2</u> Persentase penerapan sistem pengaduan	90%	90%	100%	100%	100%					
		<u>S1.P7.K1.UK1.UI3</u> Jumlah pelaksanaan penanganan pengaduan LHK	100%	100%	100%	100%	100%					
		<u>S1.P7.K1.UK1.UI4</u> Jumlah pembinaan dan sosialisasi yang telah dilakukan	95%	95%	95%	95%	95%					
		<u>S1.P7.K1.UK1.UI5</u> Jumlah sarana dan prasarana verifikator tersedia										
		<u>S1.P7.K1.UK1.UI6</u>										

LAMPIRAN C

		Jumlah sarana dan prasarana verifikator terpelihara										
UK2:												
PENGAWASAN PENAATAN									4,904,870	5,166,970	5,444,266	5,737,647
<u>S1.P7.K1.UK2.1</u> Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat	<u>S1.P7.K1.UK2.1.UI1</u> Jumlah kebijakan terkait pengawasan tersedia	0	1	4					3,039,535	3,211,968	3,394,306	3,587,126
	<u>S1.P7.K1.UK2.1.UI2</u> Persentase pelaksanaan pengawasan izin		100%	100%	100%	100%						
	<u>S1.P7.K1.UK2.1.UI3</u> Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap pemilik izin yang telah dilakukan	0	2	2	2	2						
<u>S1.P7.K1.UK2.2</u> Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	<u>S1.P7.K1.UK2.2.UI1</u> Jumlah PPLH yang dilatih dan/atau dibina	-	100	100	100	100			1,519,790	1,609,457	1,704,415	1,804,976
<u>S1.P7.K1.UK2.3</u> Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan	<u>S1.P7.K1.UK2.3.UI1</u> Jumlah sarana dan prasarana PPLH tersedia								345,545	345,545	345,545	345,545

LAMPIRAN C

	pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum	<u>S1.P7.K1.UK2.3.UI2</u> Jumlah sarana dan prasarana PPLH terpelihara	-	120	120	120	120					
	UK3: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI								4,111,590	4,347,275	4,596,596	4,860,351
	<u>S1.P7.K1.UK3</u> Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan	<u>S1.P7.K1.UK3.UI1</u> Jumlah kebijakan terkait Sanksi Administrasi tersedia	3	3	4	3	2		4,111,590	4,347,275	4,596,596	4,860,351
		<u>S1.P7.K1.UK3.UI2</u> Jumlah penerapan sanksi administrasi	97%	98%	98%	98%	98%					
	<u>S1.P7.K1.UK3.UI3</u> Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap penanggung jawab usaha	60%	60%	75%	85%	90%						

LAMPIRAN D

LAMPIRAN D: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
PENANGANAN PENGADUAN (UK1)		
Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat (S1.P7.K1.UK1)	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (EK1)	
	Meningkatnya jumlah NSPK penanganan pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.1)	Jumlah kegiatan persiapan Juknis Penanganan Pengaduan yang terlaksana (S1.P7.K1.UK1.EK1.1.E11)
		Jumlah kegiatan pembahasan Juknis Penanganan Pengaduan yang terlaksana (S1.P7.K1.UK1.EK1.1.E12)
		Tersedianya Finalisasi Juknis Penanganan Pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.1.E13)
		Jumlah Pedoman pembentukan pos pengaduan yang tersedia (S1.P7.K1.UK1.EK1.1.E14)
	Meningkatnya Pengembangan sistem pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.2)	Jumlah pos pengaduan yang tersedia (S1.P7.K1.UK1.EK1.2.E11)
		Jumlah Pengembangan sistem online pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.2.E12)
	Meningkatnya Penanganan pengaduan LHK (S1.P7.K1.UK1.EK1.3)	Persiapan penanganan pengaduan lingkungan hidup (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.E11)
		Jumlah Verifikasi lapangan penanganan pengaduan lingkungan hidup (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.E12)
		Pasca verifikasi dan penyusunan rekomendasi penanganan pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.E13)
		Jumlah Persiapan penanganan pengaduan kehutanan (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.E14)
		Verifikasi lapangan penanganan pengaduan kehutanan (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.E15)

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	
	Meningkatnya pelaksanaan Bimbingan teknis /supervisi penanganan pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.4)	Jumlah Verifikasi lapangan penanganan pengaduan kehutanan (S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI6)	
		Jumlah Penanganan kapasitas pengelola pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI1)	
		Jumlah Pendampingan pelaksanaan penanganan pengaduan oleh daerah (S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI2)	
	Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.5)	Jumlah Evaluasi bimbingan teknis penanganan pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI3)	
		Evaluasi pos pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI1)	
		Jumlah kegiatan Persiapan evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah (S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI2)	
		Pelaksanaan evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah (S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI3)	
		Jumlah kegiatan Pasca evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah (S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI4)	
		Pejalanan dinas dalam rangka menghadiri koordinasi / asistensi / sinkronisasi (S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI5)	
		Pengaduan (S1.P7.K1.UK1.EK8.EI2)	
	PENGAWASAN PENAATAN (UK2)		
	Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat (S1.P7.K1.UK2)	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH (EK2)	
		Meningkatnya ketersediaan NSPK terkait izin pengawasan	Jumlah Revisi peraturan perundangan yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK2.1.EI1)

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
	(S1.P7.K1.UK2.EK2.1)	Jumlah pedoman SOP pengawasan yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK2.1.EI2)
	Meningkatnya kegiatan Perencanaan pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK2.2)	terbangunnya database e-monitoring (S1.P7.K1.UK2.EK2.2.EI1)
		Tersedianya konsep websote subdit pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK2.2.EI2)
	Meningkatnya kegiatan Pelaksanaan pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK2.3)	Jumlah kegiatan Pengawasan langsung (S1.P7.K1.UK2.EK2.3.EI1)
		Jumlah kegiatan Pengawasan tidak langsung (S1.P7.K1.UK2.EK2.3.EI2)
	Meningkatnya pengembangan sistem pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK2.4)	Jumlah materi publikasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK2.4.EI1)
	Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK2.5)	Jumlah kegiatan Sosialisasi E-Monitoring yang terlaksana (S1.P7.K1.UK2.EK2.5.EI1)
Jumlah laporan akhir tingkat ketaatan yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK2.5.EI2)		
Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) (S1.P7.K1.UK2)	Sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun (EK3)	
	Meningkatnya ketersediaan NSPK terkait izin pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK3.1)	Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK3.1.EI1)
		Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu/penerapan sanksi administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK3.1.EI2)
		Jumlah Finalisasi draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
		administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK3.1.EI3)
	Meningkatnya kegiatan Perencanaan pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK3.2)	Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang sumber daya alam yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK3.2.EI1)
		Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang industry, prasarana, dan jasa yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK3.2.EI2)
		Tersedianya konsep websote subdit pengawasan (S1.P7.K1.UK2.EK3.2.EI3)
	Meningkatnya kegiatan Bimbingan teknis pelaksanaan sanksi administratif (S1.P7.K1.UK2.EK3.3)	Jumlah kapasitas PPLH/D dan SDM Pemda dan PSA yang ditingkatkan (S1.P7.K1.UK2.EK3.3.EI1)
		Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang SDA yang terlaksana (S1.P7.K1.UK2.EK3.3.EI2)
		Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang indsutri, prasarana, dan jasa yang terlaksana (S1.P7.K4.UK4.EK1.3.EI3)
	Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sanksi administratif (S1.P7.K1.UK2.EK3.4)	Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI1)
		Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI2)
		Pasca pemantauan lapangan sanksi administtrasi bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI3)
		Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI4)

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
		Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI5)
		Pasca pemantauan lapangan sanksi administtrasi bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK2.EK3.4.EI6)
Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S1.P7.K1.UK2)	Sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum (EK4)	
	Meningkatnya sarana dan prasarana PPLH yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK4)	Jumlah peralatan dan barang yang tersedia (S1.P7.K1.UK2.EK4.EI1)
	Layanan perkantoran (EK6)	
	Meningkatnya kegiatan Operasional dan pemeliharaan kantor (S1.P7.K1.UK2.EK6)	Jumlah kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan (S1.P7.K1.UK2.EK6.EI1)
		Jumlah Pemeliharaan perkantoran yang terlaksana (S1.P7.K1.UK2.EK6.EI2)
		Jumlah Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri koordinasi / asistensi/ supervisi yang terlaksana (S1.P7.K1.UK2.EK6.EI3)
	Kendaraan Bermotor (EK7)	
	Meningkatnya pengadaan Peralatan dan mesin (S1.P7.K1.UK2.EK7)	
Peralatan dan fasilitas perkantoran (EK8)		
Meningkatnya pengadaan Peralatan dan mesin	Sanksi administrasi (S1.P7.K1.UK2.EK8.EI1)	

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
	(S1.P7.K1.UK2.EK8)	Pengaduan (S1.P7.K1.UK2.EK8.EI2)
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI (UK3)		
Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan (S1.P7.K1.UK3)	Sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahun (EK3)	
	Meningkatnya NSPK terkait peneraan sanksi administrasi (S1.P7.K1.UK3.EK3.1)	Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI1)
		Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu/penerapan sanksi administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI2)
		Jumlah Finalisasi draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi administrasi yang tersedia (S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI3)
	Meningkatnya Pelaksanaan sanksi administrasi (S1.P7.K1.UK3.EK3.2)	Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang sumber daya alam yang tersedia (S1.P7.K1.UK3.EK3.2.EI1)
		Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang industry, prasarana, dan jasa yang tersedia (S1.P7.K1.UK3.EK3.2.EI2)
	Meningkatnya kegiatan Bimbingan teknis pelaksanaan sanksi administratif (S1.P7.K1.UK3.EK3.3)	Jumlah kapasitas PPLH/D dan SDM Pemda dan PSA yang ditingkatkan (S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI1)
Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang SDA yang terlaksana (S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI2)		

LAMPIRAN D

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN
		Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang industri, prasarana, dan jasa yang terlaksana (S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI3)
	Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sanksi administratif (S1.P7.K1.UK3.EK3.4)	Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI1)
		Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI2)
		Pasca pemantauan lapangan sanksi administratif bidang sumber daya alam (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI3)
		Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI4)
		Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI5)
		Pasca pemantauan lapangan sanksi administratif bidang industri, prasarana, dan jasa (S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI6)

LAMPIRAN E

LAMPIRAN E: TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN ELEMEN KEGIATAN

SASARAN UNIT KEGIATAN	SASARAN ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	TARGET					ALOKASI PENDANAAN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
UK1													
PENANGANAN PENGADUAN								5,888,164	6,228,666	6,588,991	6,970,297		
S1.P7.K1.UK1 Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat	EK1	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti						5,543,294	5,870,346	6,216,697	6,583,483		
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.1</u>	Meningkatnya jumlah NSPK penanganan pengaduan	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.1.EI1</u>	Jumlah kegiatan persiapan Juknis Penanganan Pengaduan yang terlaksana					554,329	587,035	621,670	658,348	
			<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.2.EI2</u>	Jumlah kegiatan pembahasan Juknis Penanganan Pengaduan yang terlaksana									
			<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI3</u>	Tersedianya Finalisasi Juknis Penanganan Pengaduan									
			<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI4</u>	Jumlah Pedoman pembentukan pos pengaduan yang tersedia									
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.2</u>	Meningkatnya Pengembangan sistem pengaduan	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.2.EI1</u>	Jumlah pos pengaduan yang tersedia					609,762	645,738	683,837	724,183
				<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.2.EI2</u>	Jumlah Pengembangan sistem online pengaduan								
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3</u>		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI1</u>						3,325,976	3,522,208	3,730,018	3,950,090

LAMPIRAN E

Meningkatnya Penanganan pengaduan LHK	Persiapan penanganan pengaduan lingkungan hidup											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI2</u> Jumlah Verifikasi lapangan penanganan pengaduan lingkungan hidup											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI3</u> Pasca verifikasi dan penyusunan rekomendasi penanganan pengaduan											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI4</u> Jumlah Persiapan penanganan pengaduan kehutanan											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI5</u> Verifikasi lapangan penanganan pengaduan kehutanan											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.3.EI6</u> Jumlah Verifikasi lapangan penanganan pengaduan kehutanan											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.4</u> Meningkatnya pelaksanaan bimbingan teknis /supervisi penanganan pengaduan	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI1</u> Jumlah Penanganan kapasitas pengelola pengaduan							498,896	528,331	559,503	592,513
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI2</u> Jumlah Pendampingan pelaksanaan penanganan pengaduan oleh daerah											
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.4.EI3</u> Jumlah Evaluasi bimbingan											

LAMPIRAN E

		teknis penanganan pengaduan										
	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5</u> Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan	<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI1</u> Evaluasi pos pengaduan							831,494	880,552	932,505	987,522
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI2</u> Jumlah kegiatan Persiapan evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah										
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI3</u> Pelaksanaan evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah										
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI4</u> Jumlah kegiatan Pasca evaluasi penanganan pengaduan oleh daerah										
		<u>S1.P7.K1.UK1.EK1.5.EI5</u> Pejalanan dinas dalam rangka menghadiri koordinasi / asistensi / sinkronisasi										
UK2 PENGAWASAN PENAATAN									4,904,870	5,166,970	5,444,266	5,737,647
<u>S1.P7.K1.UK2</u> Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat	EK2 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH								2,694,665	2,853,648	3,022,013	3,200,312
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.1</u> Meningkatnya ketersediaan NSPK terkait izin pengawasan	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.1.EI1</u> Jumlah Revisi peraturan perundangan yang tersedia							538,933	570,730	604,403	640,062
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.1.EI2</u> Jumlah pedoman SOP										

LAMPIRAN E

		pengawasan yang tersedia										
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.2</u> Meningkatnya kegiatan Perencanaan pengawasan	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.2.EI1</u> terbangunnya database e-monitoring							404,200	428,047	453,302	480,047
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.2.EI2</u> Tersedianya konsep websote subdit pengawasan										
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.3</u> Meningkatnya kegiatan Pelaksanaan pengawasan	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.3.EI1</u> Jumlah kegiatan Pengawasan langsung							1,751,532	1,854,871	1,964,308	2,080,203
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.3.EI2</u> Jumlah kegiatan Pengawasan tidak langsung										
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.4</u> Meningkatnya pengembangan sistem pengawasan	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.4.EI1</u> Jumlah materi publikasi yang tersedia							80,840	85,609	90,660	96,009
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.5</u> Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan	<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.5.EI1</u> Jumlah kegiatan Sosialisasi E-Monitoring yang terlaksana							134,733	142,682	151,101	160,016
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK2.5.EI1</u> Jumlah laporan akhir tingkat ketaatan yang tersedia										
<u>S1.P7.K1.UK2</u> Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	EK5 Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)								1,519,790	1,609,457	1,704,415	1,804,976
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK5</u> Meningkatnya kegiatan Pelatihan PPLH	<u>S1.P7.K1.UK2.EK5.IK1</u> Jumlah kegiatan Bimtek kepada PPLH dan PPLHD di 6 Provinsi yang terlaksana							1,143,150	1,223,171	1,308,792	1,400,408
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK5.IK2</u> Jumlah kegiatan Bimtek pelaksanaan pengawasan di							376,640	403,005	431,215	461,400

LAMPIRAN E

		6 provinsi yang melaksanakan dekon														
<u>S1.P7.K1.UK2</u> Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum	EK4 Sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum											345,545	345,545	345,545	345,545	
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK4</u> Meningkatnya sarana dan prasarana PPLH yang tersedia	<u>S1.P7.K1.UK2.EK4.EI1</u> Jumlah peralatan dan barang yang tersedi										345,545	369,733	395,614	423,307	
	EK6 Layanan perkantoran												554,210	575,824	698,281	621,614
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK6</u> Meningkatnya kegiatan Operasional dan pemeliharaan kantor	<u>S1.P7.K1.UK2.EK6.EI1</u> Jumlah kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan											184,400	197,308	211,120	225,898
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK6.EI2</u> Jumlah Pemeliharaan perkantoran yang terlaksana											256,060	273,984	293,163	313,685
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK6.EI3</u> Jumlah Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri koordinasi / asistensi/ supervisi yang terlaksana												113,750	121,713	130,232
	EK7 Kendaraan bermotor												100,000	103,900	107,952	112,162
	<u>S1.P7.K1.UK2.EK7</u> Meningkatnya pengadaan Peralatan dan mesin												100,000	103,900	107,952	112,162
	EK8 Peralatan dan fasilitas perkantoran												380,400	395,235	410,649	426,665

LAMPIRAN E

	<u>S1.P7.K1.UK2.EK8</u> Meningkatnya pengadaan Peralatan dan mesin	<u>S1.P7.K1.UK2.EK8.EI1</u> Sanksi administrasi							242,000	258,940	277,066	296,460
		<u>S1.P7.K1.UK2.EK8.EI2</u> Pengaduan							138,400	148,088	158,454	169,546
UK3 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI									4,111,590	4,347,275	4,596,596	4,860,351
<u>S1.P7.K1.UK3</u> Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan	EK3 Sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat tiap tahu								3,766,720	3,988,955	4,224,302	4,473,537
	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.1</u> Meningkatnya NSPK terkait penenaan sanksi administrasi	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI1</u> Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi adminstrasi yang tersedia							452,006	478,675	506,916	536,824
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI2</u> Jumlah draft peraturan menteri tentang jangka waktu/penerapan sanksi administrasi yang tersedia										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.1.EI3</u> Jumlah Finalisasi draft peraturan menteri tentang jangka waktu penerapan sanksi administrasi yang tersedia										
	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.2</u> Meningkatnya Pelaksanaan sanksi administrasi	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.2.EI1</u> Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang sumber daya alam yang tersedia							376,672	398,896	422,430	447,354

LAMPIRAN E

		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.2.EI2</u> Jumlah Penerapan sanksi administrasi bidang industry, prasarana, dan jasa yang tersedia										
Meningkatnya kegiatan Bimbingan teknis pelaksanaan sanksi administratif	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.3</u>	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI1</u> Jumlah kapasitas PPLH/D dan SDM Pemda dan PSA yang ditingkatkan						941,680	997,239	1,056,076	1,118,384	
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI2</u> Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang SDA yang terlaksana										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.3.EI3</u> Jumlah kegiatan Evaluasi penerapan SA yang diterapkan oleh pusat dan daerah bidang indsutri, prasarana, dan jasa yang terlaksana										
	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4</u>	<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI1</u> Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang sumber daya alam						2,260,032	2,393,373	2,534,581	2,684,122	
Meningkatnya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan sanksi administratif		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI2</u> Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang sumber daya alam										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI3</u> Pasca pemantauan lapangan sanksi administtrasi bidang										

LAMPIRAN E

		sumber daya alam										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI4</u> Persiapan pemantauan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI5</u> Pemantauan lapangan sanksi administrasi bidang industri, prasarana, dan jasa										
		<u>S1.P7.K1.UK3.EK3.4.EI6</u> Pasca pemantauan lapangan sanksi administtrasi bidang industri, prasarana, dan jasa										



DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

